



Deli Serdang Smart City

2019-2025

*"Advanced and Prosperous Smart City,
Bhinneka honours Religious in Diversity"*

Deli Serdang, Kota Cerdas yang Maju dan Sejahtera,
Kebhinnekaan menjunjung
Keber'agama'an dalam Keberagaman

2

Pengantar

Kabupaten Deli Serdang memiliki luas wilayah 2.497,72 km² menjadi

bagian dari kawasan perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang dan Karo (Mebidangro). Deli Serdang telah ditetapkan jadi kawasan strategis nasional sesuai Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sekitar dua per tiga luasan Mebidangro berada di Deli Serdang. Berdasarkan peran Deli Serdang dalam Mebidangro, Deli Serdang mempunyai peran strategis yaitu wilayahnya yang mengelilingi Kota Medan menjadikan Kabupaten Deli Serdang sebagai wilayah *business opportunites* (peluang bisnis/ekonomi), pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional.

Selain Kawasan Industri Medan, Pemerintah Daerah Deli Serdang melalui langkah strategis telah memformulasikan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan kawasan perkotaan Mebidangro melalui program strategis. Seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu di Paluh Merbau Kecamatan Percut Sei Tuan, pengembangan Kawasan Industri Deli Serdang (KIDS) di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kawasan Industri (KI) Tanjungmorawa, KI Hamparan Perak, KI di Kecamatan Labuhan Deli, KI di Kecamatan Patumbak dan KI Kecamatan Sunggal. Begitu juga pengembangan Kota Mandiri Kualanamu terbentang di antara Belawan dan Bandara Kualanamu yakni di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Batangkuis seluas berkisar 8.172 hektare. Kontribusi Industri Pengolahan Lapanganusaha Industri pengolahan merupakan penyokong utama bagi pembentukan PDRB Deli Serdang mencapai 32,22 persen pada tahun 2017. Pengembangan Industri ini didukung melalui penguatan konektivitas daerah dengan pengembangan Bandara Internasional Kualanamu akan dikembangkan menjadi kawasan aerotropolis yang berintegrasi dengan dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Medan, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Melalui integrasi tersebut akan membentuk super koridor Bandara Internasional Kualanamu – Pelabuhan Belawan – Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, atau Mebidangro, serta Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, dan kawasan-kawasan industri lainnya.

Secara makro ekonomi, PDRB Deli Serdang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 mencapai 93,19 triliun rupiah. Perannya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 13,49 persen, kedua tertinggi setelah Kota Medan yang berperan sebesar 29,57 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Di sisi pembangunan manusia, IPM Deli Serdang kembali meningkat secara konsisten menuju level

73,94 sedangkan tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,62%. Sedangkan tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Deli Serdang pada tahun 2017 adalah 65,53 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah 6,16 persen. Berbagai kemajuan pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas merupakan komitmen bersama seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Deli Serdang guna mewujudkan

“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinnekaan”.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, inisiasi teknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas Negara untuk membentuk peradaban baru yang mengintegrasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. Perkembangan teknologi informasi di dunia sangatlah masif dengan berbagai inovasi yang mencuat dari kalangan generasi. Penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan *grand scenario* berupa tren *Internet of Things* (IoT). Perbaikan di setiap fungsi adalah guratan tegas untuk mewujudkan Indonesia Smart Nation. Negara cerdas yang dibentuk dengan membangun kota-kotanya untuk menjadi cerdas melalui platform kebijakan pembangunan Smart City. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Pada tahun 2018, Kabupaten Deli Serdang terpilih dari salah satu diantara 50 Kota kedua untuk menjadi *Pilot Project* Smart City. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan *smart nation* yang dirangkai dari *smart cities* maka Kabupaten Deli Serdang melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan **Deli Serdang Smart City**

Deli Serdang **Smart City**

2019-2025



*"Advanced and Prosperous Smart City,
Bhinneka honours Religious in Diversity"*

**Deli Serdang, Kota Cerdas yang Maju dan Sejahtera,
Kebhinnekaan menjunjung Keber'agama'an dalam Keberagaman**

Dimensi Deli Serdang Smart City menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*). Melalui visi Deli Serdang Smart City, kelindan Pembangunan Deli Serdang yang dirangkai dalam “Kebhinekaan menjunjung Keber'agama'an dalam Keberagaman” menghadirkan Deli Serdang sebagai penggerak pembangunan nasional dengan industri, konektivitas, dan berbagai inovasi lain namun tetap menjaga Deli Serdang sebagai Kota yang Religius yang mempersatukan keragamaan Budaya selaras dengan kerukunan umat beragama berlandaskan nilai-nilai keluhuran Deli Serdang.

BUPATI DELI SERDANG

H. ASHARI TAMBUNAN

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
a	Latar Belakang	1
b	Tujuan Masterplan Deli Serdang Smart City	4
c	Landasan Hukum	5
d	Kerangka Pikir Deli Serdang Smart City	7
2	Visi Deli Serdang Smart City	8
3	Strategi Pembangunan Deli Serdang Smart City	13
	Strategi Smart Governance	15
	Strategi Smart Branding	17
	Strategi Smart Economy	18
	Strategi Smart Living	20
	Strategi Smart Society	21
	Strategi Smart Environment	22
	Matriks Sinkronisasi Strategi dan Analisa Kesenjangan	26
4	Rencana Aksi Deli Serdang Smart City	29
	Rencana Aksi Smart Governance G1 (1-16)	29
	Rencana Aksi Smart Governance G2 (17-36)	31
	Rencana Aksi Smart Governance G3 (37-44)	33
	Rencana Aksi Smart Branding B1 (1-8)	35
	Rencana Aksi Smart Branding B2 (9-12)	36
	Rencana Aksi Smart Branding B1 (13-17)	36
	Rencana Aksi Smart Economy Ec-1 (1-5)	37
	Rencana Aksi Smart Economy Ec-2 (6-7)	37
	Rencana Aksi Smart Economy Ec-3 (8-27)	37
	Rencana Aksi Smart Economy Ec-4 (28-30)	39
	Rencana Aksi Smart Living L1 (1-5)	40
	Rencana Aksi Smart Living L2 (6-25)	40
	Rencana Aksi Smart Living L3 (26-34)	43
	Rencana Aksi Smart Society S1 (1-6)	45
	Rencana Aksi Smart Society S2 (7-11)	45
	Rencana Aksi Smart Society S3 (12-14)	46
	Rencana Aksi Smart Environment En1(1-5)	47
	Rencana Aksi Smart Environtent En2(6-10)	47
	Rencana Aksi Smart Environtent En3 (11-12)	48
5	Peta Jalan Deli Serdang Smart City	49
5.1	Kesiapan Deli Serdang Smart City	49
a	Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	49
b	Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Deli Serdang Smart City	50
c	Rencana Pengembangan Aplikasi & Perangkat Lunak Pendukung Deli	51

	Serdang Smart City	
d	Rencana Penguatan Literasi Deli Serdang Smart City	56
5.2	Program Kerja	57
	Program Kerja Smart Governance G1 (1-16)	57
	Program Kerja Smart Governance G2 (17-36)	51
	Program Kerja Smart Governance G3 (37-44)	64
	Program Kerja Smart Branding B1 (1-8)	67
	Program Kerja Smart Branding B2 (9-12)	69
	Program Kerja Smart Branding B1 (13-17)	70
	Program Kerja Smart Economy Ec-1 (1-5)	71
	Program Kerja Smart Economy Ec-2 (6-7)	72
	Program Kerja Smart Economy Ec-3 (8-27)	72
	Program Kerja Smart Economy Ec-4 (28-30)	75
	Program Kerja Smart Living L1 (1-5)	76
	Program Kerja Smart Living L2 (6-25)	77
	Program Kerja Smart Living L3 (26-34)	82
	Program Kerja Smart Society S1 (1-6)	84
	Program Kerja Smart Society S2 (7-11)	85
	Program Kerja Smart Society S3 (12-14)	87
	Program Kerja Smart Environtent En1(1-5)	89
	Program Kerja Smart Environtent En2(6-10)	90
	Program Kerja Smart Environtent En3 (11-12)	91
6	Penutup	92

Daftar Gambar

2.1	Pengguna Internet di Indonesia	1
2.2	Aktivitas Internet di Indonesia	2
2.3	Elemen IoT	3
2.4	Dimensi Deli Serdang Smart City	4
2.5	Kerangka Pikir Deli Serdang Smart City	7
2.6	Konsep Smart City di Indonesia	13
2.7	Konsep House of Governance	14
2.8	Pengembangan City Branding	16
2.9	Kerangka Analisis SWOT	24

Daftar Tabel

2.1	Sinkronisasi Kinerja Utama Teknokratis RPJMD 2020-2025 & Dimensi Smart City	12
-----	---	----

Pendahuluan



a. Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk membuat atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Sejak dekade 1970-an, teknologi informasi di Indonesia berkembang secara bertahap. Berdasarkan catatan Fakultas Ilmu Komputer UI, teknologi komputer mulai diperkenalkan di Indonesia dalam kurun antara tahun 1970-an. Selain itu kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat ketika ditemukannya internet. Pada awalnya, yaitu tahun 1969, Departemen Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat mengembangkan suatu jaringan komunikasi yang menjadi cikal bakal internet dengan nama ARPnet (*Advanced Research Project Agency Network*). Jaringan komunikasi ini hanya terhubung antara sistem komputer pemerintah dan militer. Jaringan komunikasi ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga keamanan sistem komputer apabila terjadi bencana atau perang. Melihat manfaatnya yang begitu besar para ilmuwan dari berbagai universitas di Amerika Serikat juga mengembangkan jaringan komputer yang mirip dengan ARPnet, yaitu NSFnet (*Nation Science Foundation*). NSFnet ini ternyata lebih baik dan lebih murah sehingga terus dikembangkan agar bisa digunakan oleh masyarakat umum. Pada tahun 1993, internet mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum.



Gambar 2.1 Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Dalam pemanfaatan internet, populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali – Nusa Tenggara 5,63 persen, dan Maluku – Papua 2,49 persen.

Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini mengabsahkan profesi-profesi baru di ranah maya, semisal Selebgram (selebritas Instagram) dan YouTuber (pembuat *content* YouTube). Menjamurnya perusahaan rintisan digital atau *startup* pun sedikit banyak digerakan oleh kelompok usia ini, baik mereka sebagai pendiri atau konsumen. Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, orang tua di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet.

Selain usia, faktor pendidikan memengaruhi penetrasi internet di Indonesia. Sebanyak 88,24 dari mereka yang menggenggam gelar S2 dan S3 terhubung dengan internet. Mayoritas lulusan S1 dan Diploma juga telah menggunakan internet, yakni sebanyak 79,23 persen. Dibeberapa universitas dan akademi kejuruan, internet memang telah menjadi bagian penting dari proses belajar-mengajar. Contohnya, tugas dan ujian dikumpulkan lewat e-mail, bukan lagi berbentuk kertas. Mencari referensi pun kerap dari jurnal online atau e-book, bukan buku-buku fisik. Dalam proses administrasi seperti pengambilan mata kuliah, evaluasi dosen, hingga survey di kampus juga sudah terhubung kesistem online. Untuk yang tingkat pendidikannya sampai SMA/ MA/ Paket C, SMP/ MTs/ Paket B, SD/ MI/ Paket A, dan yang tidak sekolah, persentase pengguna internetnya secara berurutan 70,54 persen, 48,53 persen, 25,10 persen, dan 5,45 persen. Dari level ekonomi juga bisa dibedakan, di mana mayoritas pengguna internet berasal dari kelas menengah ke bawah. Dari 143 juta masyarakat Indonesia yang sudah terkoneksi internet, ada sekitar 62,5



Gambar 2.2
Aktivitas Internet di Indonesia

juta masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggunakan internet. Sedangkan masyarakat kelas atas sebesar 2,8 juta jiwa.

Perkembangan teknologi informasi di dunia sangatlah masif dengan berbagai inovasi yang mencuat dari kalangan generasi. Penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan *grand scenario* berupa tren *Internet of Things* (IoT). Melalui skenario IoT, pemanfaatan jaringan internet akan dieksploitasi secara komprehensif melalui pengembangan suatu obyek, sensor dan perangkat meskipun bukan komputer untuk beraktivitas dengan meminimalkan interaksi manusia. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniatur (*miniaturization*), *big data analytics* dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing*)¹.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, inisiasi teknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas Negara untuk membentuk peradaban baru yang mengintegrasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. Perbaikan di setiap fungsi adalah guratan tegas untuk mewujudkan Indonesia Smart Nation. Negara cerdas yang dibentuk dengan membangun kota-kotanya untuk menjadi cerdas melalui platformkebijakan pembangunan Smart City. **Smart City** merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Membangun Smart City adalah mewujudkan ekosistem daerah yang lebih layak tinggal dengan kultur daerah yang kreatif, memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan serta dengan ciri khas memanfaatkan teknologi. Negara hadir untuk melayani, memberdayakan, dan membangun warga negara. Integrasi teknologi dalam tata kelola kota untuk mewujudkan Smart City dimungkinkan berkat keberadaan *internet of things*, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia

yang minimal. Peran *internet of things* (IoT) dalam mewujudkan konsep Smart City sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis. Sedangkan operasional perangkat IoT hanya memerlukan tiga elemen utama, yakni perangkat fisik, jaringan internet,

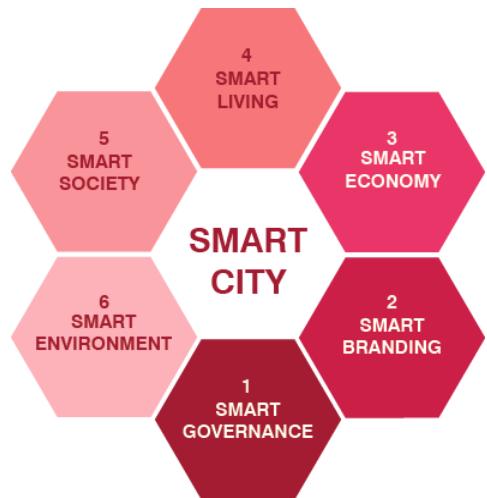


Gambar 2.3 Elemen IoT

¹ Ibid.

dan aplikasi.

Implementasi Smart City di Indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Dalam rangka mengembangkan Smart City di Indonesia, Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 Smart City atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2018, Kabupaten Deli Serdang terpilih dari salah satu diantara 50 Kota kedua untuk menjadi *Pilot Project* Smart City. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk



Gambar 2.4 Dimensi Deli Serdang Smart City

mewujudkan *smart nation* yang dirangkai dari *smart cities* maka Kabupaten Deli Serdang melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan **Deli Serdang Smart City**. Dimensi Deli Serdang Smart City menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Pengembangan Deli Serdang Smart City didukung melalui perumusan *roadmap* atau peta jalan pembangunan Deli Serdang Smart City dalam 5 tahun didukung perencanaan dan pelaksanaan “Quick Win” Deli Serdang Smart City. Berlandaskan kesepahaman visi pembangunan nasional dan daerah didukung komitmen maka seluruh “Quick Win” maupun peta jalan pembangunan Deli Serdang Smart City dituangkan dalam Masterplan Deli Serdang Smart City sebagai bagian perencanaan operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019. Menjelang masa berakhirnya pemerintahan Deli Serdang pada tahun 2019, maka masterplan Deli Serdang Smart City menjadi dokumen perencanaan operasional yang strategis sebagai landasan atau pertimbangan penyusunan Rencangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2025.

b. Tujuan Masterplan Deli Serdang Smart City

Tujuan umum perumusan masterplan Deli Serdang Smart City adalah untuk menjadi pedoman dalam pengembangan 6 (enam) dimensi Smart City meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan

pemeliharaan lingkungan (*smart environment*). Adapun tujuan perumusan masterplan Deli Serdang Smart City secara khusus meliputi:

1. Masterplan Deli Serdang Smart City adalah dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019 dan sebagai landasan atau pertimbangan penyusunan Rencangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2025.
2. Masterplan Deli Serdang Smart City selaras dengan perencanaan sektoral lainnya seperti RAD HAM, RAD Pencegahan Korupsi, Roadmap Reformasi Birokrasi, Pro Poor Planing, Budgeting, and Monitoring, dan rencana aksi lain dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
3. Masterplan Deli Serdang Smart City menjadi pedoman dalam perumusan visi Smart City, Quick Wins, Peta Jalan, dan menentukan strategi serta rencana aksi Smart City di 6 dimensi.

c. Landasan Hukum

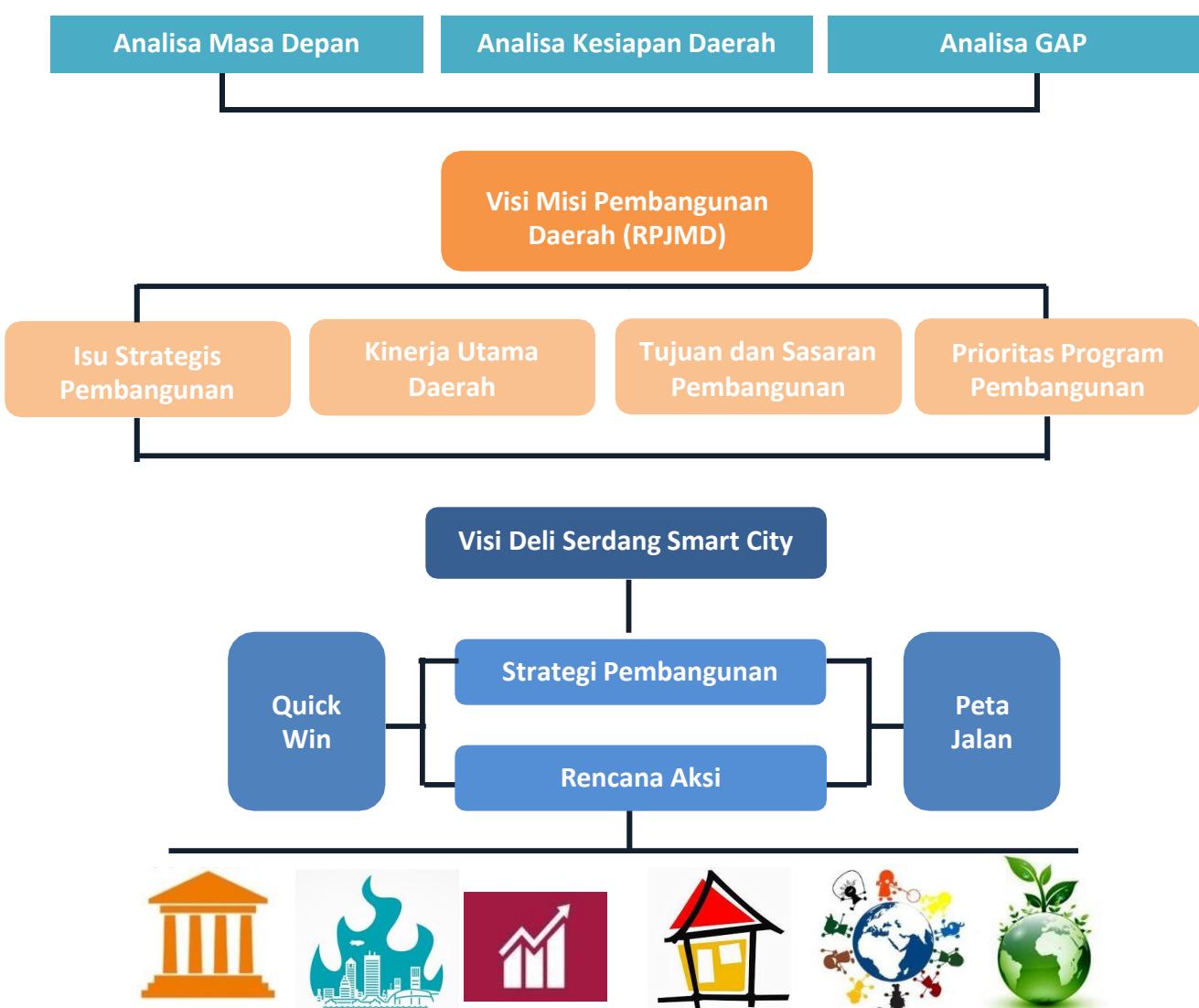
Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan Masterplan Deli Serdang Smart City, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah tentang Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Deli Serdang 2014 – 2019;

d. Kerangka Pikir Deli Serdang Smart City

Kerangka pikir Deli Serdang Smart City merupakan kesinambungan analisa masa depan, kesiapan daerah, dan gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan *Smart City Readiness*. Sebagai bagian dari arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep Smart City menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, dan prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi Deli Serdang Smart City yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi dimana dimuat program unggulan (*quick wins*) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan.



Gambar 2.5 Kerangka Pikir Deli Serdang Smart City

Visi Deli Serdang Smart City



Pada masa bhakti 2014 – 2019, pembangunan Kabupaten Deli sebagai bagian dari tahap III rencana jangka panjang 2005 – 2025 mengakomodasi berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan baik dalam konstelasi internasional, nasional, regional maupun regional, mempertimbangkan prioritas program-program nasional dan kebijakan nasional meliputi pengembangan wilayah, kebijakan pembangunan lintas sektoral, maupun pembangunan inklusif yang melibatkan proses teknokratis dan politis. Visi Kabupaten Deli Serdang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 2014 – 2019. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Deli Serdang yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 – 2019 adalah:

"Deli Serdang yang Maju dan Berdaya Saing dengan Masyarakatnya yang Religius dan Bersatu dalam Kebhinekaan"

Visi Kabupaten Deli Serdang merupakan semangat untuk merangkul seluruh *stakeholder* pembangunan serta menjadi sinkronisasi arah kebijakan di setiap sektor penyelenggaraan pemerintahan baik dalam tataran program hingga output. Secara filosofis, visi Kabupaten Deli Serdang mengandung makna sebagai berikut:

Deli Serdang yang maju dan berdaya saing

Diwujudkan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.

Masyarakat yang religius dan bersatu dalam

Diwujudkan melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap menjaga toleransi antar umat beragama dan etnis lain, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan hak azasi

kebhinekaan manusia.

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (misi pertama), infrastruktur berkelanjutan dan ekologi (misi kedua), perekonomian (misi ketiga), kehidupan sosial dan budaya (misi keempat), dan profesionalisme aparatur dan supremasi hukum (misi kelima). Penjabaran misi tersebut dijabarkan sebagaimana berikut:

Misi Deli Serdang 2014 – 2019

Misi Pertama	:	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
Misi Kedua	:	pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
Misi Ketiga	:	membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
Misi Keempat	:	meningkatkan kualitas kehidupan beragama, peran sosial kemasyarakatan dan budaya daerah
Misi Kelima	:	Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah, profesionalisme aparatur dan supremasi hukum

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dijabarkan berikut:

Misi ke-1	Tujuan Pertama	:	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang berpendidikan
	Tujuan Kedua	:	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sehat
Misi ke-2	Tujuan Ketiga	:	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
	Tujuan Keempat	:	Mewujudkan Deli Serdang sebagai kawasan aman, nyaman, dan berkelanjutan
Misi ke-3	Tujuan Kelima	:	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
	Tujuan	:	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Keenam		
Misi ke-4	Tujuan Ketujuh	: Mewujudkan moral masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama
	Tujuan kedelapan	: Mewujudkan terciptanya nilai-nilai budaya sesuai kearifan lokal
	Tujuan kesembilan	: Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang
Misi ke-5	Tujuan kesepuluh	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>

Memperhatikan isu strategis baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, mempertimbangkan kebijakan perencanaan jangka panjang, menelaah visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019, serta sebagai telaah yang logis dan implementatif untuk Rancangan Teknokratik RPJMD Deli Serdang 2020-2025 dan selaras dengan semangat yuridis, filosofis, dan sosiologis pembangunan Deli Serdang maka Visi Deli Serdang Smart City 2019-2025 adalah sebagai berikut:

Deli Serdang Smart City 2019 – 2025



*“Advanced and Prosperous Smart City,
Bhinneka honours Religious in Diversity”*

Deli Serdang, Kota Cerdas yang Maju dan Sejahtera, Kebhinnekaan menjunjung Keber'agama'an dalam Keberagaman

Visi Deli Serdang Smart City sebagai **Kota Cerdas yang Maju dan Sejahtera** merupakan selaras dengan masifnya perkembangan infrastruktur dan konektivitas daerah Deli Serdang. Daya Saing Deli Serdang sebagai kawasan Metropolitan Medan atau Kawasan Perkotaan Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) atau dimana sekitar 82,78% wilayah Mebidangro menjadikan Deli Serdang sebagai kota berlabuhnya investasi. Kemudahan perizinan dan pengelolaan kawasan yang *operable* didukung dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu di Paluh Merbau Kecamatan Percut Sei Tuan, pengembangan Kawasan Industri Deli Serdang (KIDS) di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kawasan Industri lain serta, Kota Mandiri Kuala Bekala. Selain itu, konektivitas, Deli Serdang sangat strategis dengan pengembangan Bandara Internasional Kualanamu akan dikembangkan menjadi kawasan aerotropolis yang berintegrasi dengan dua

pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Medan, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara. Penetrasi teknologi informasi dan perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniature (*miniaturization*), *big data analytics* dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing*) menjadi pendukung untuk menghadirkan daya saing Deli Serdang yang cerdas.

Kelindan Pembangunan Deli Serdang yang dirangkai dalam “Kebhinnekaanmenjunjung Keber’agama’an dalam Keberagaman” menghadirkan Deli Serdang sebagai penggerak pembangunan nasional dengan industri, konektivitas, dan berbagai inovasi lain namun tetap menjaga Deli Serdang sebagai kota yang religius yang mempersatukan keragamaan budaya. Pembangunan yang bergeliat harus selaras dengan kerukunan umat beragama berlandaskan nilai-nilai keluhuran Deli Serdang.

Masterplan Deli Serdang Smart City adalah dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019. Menjelang masa berakhirnya pemerintahan Deli Serdang pada tahun 2019, maka masterplan Deli Serdang Smart City menjadi dokumen perencanaan operasional yang strategis sebagai landasan atau pertimbangan penyusunan Rencangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2025.

Sebagai dokumen perencanaan operasional, maka masterplan Deli Serdang Smart City selaras dengan perencanaan sektoral lainnya seperti Rencana Aksi daerah Hak Asasai Manusia (RanHAM), Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Roadmap Reformasi Birokrasi, Pro Poor Planing, Budgeting, and Monitoring, dan rencan aksi lain dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Masterplan Deli Serdang Smart City memiliki konsep 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*). Kerangka pikir Deli Serdang Smart City merupakan kesinambungan analisa masa depan, kesiapan daerah, dan kesenjangan atau gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan *Smart City Readiness* atau kesiapan daerah dalam mengimplementasikan konsep Smart City. Sebagai bagian arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep Smart City menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi Deli Serdang Smart City yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi dimana dimuat program unggulan (*quick wins*) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan.

Mempertimbangkan Masterplan Deli Serdang Smart City sebagai dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019 serta sebagai landasan atau pertimbangan penyusunan Rencangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 - 2025 maka berikut rekomendasi Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan Dimensi Smart City dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Deli Serdang.

Tabel 2.1
Sinkronisasi Kinerja Utama Teknokratis RPJMD 2020-2025 & Dimensi Smart City

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Dimensi Deli Serdang Smart City				
			Smart Government	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society
1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang Berpendidikan dan Sehat	Indek Pembangunan Manusia					
2	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan sebagai kawasan aman, nyaman, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
		Indeks Desa Membangun					
3	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi					
		Laju Inflasi					
4	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan					
		Gini Ratio					
5	Mewujudkan moral masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama, terciptanya nilai-nilai budaya sesuai kearifan lokal	Nilai Peduli HAM					
		Indeks Pembangunan Gender					
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	Indeks Reformasi Birokrasi					

Strategi Pembangunan Smart City



Konsep Smart City sebagai kota yang mengintegrasikan antara ICT (*Information & Communication Technology*) dengan segala peralatan fisik yang terhubung dalam sebuah jaringan (*Internet of Things/ IoT*) sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik dan operasional sebuah kota.² Jadi, Smart City memungkinkan pemerintah kota untuk berinteraksi langsung dengan komunitas dan infrastruktur kota dengan tujuan untuk memonitor apa yang terjadi dengan kotanya dan menuju ke arah mana perubahan suatu kotanya. Dalam pengembangan Smart City, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang berbeda baik dari segi budaya maupun ketersediaan infrastruktur. Maka dalam perencanaan Smart City harus berpedoman pada kebutuhan, kondisi dan visi misi daerah. Perencanaan Smart City di Indonesia harus dimulai dari desa.³



Gambar 2.6 Konsep Smart City di Indonesia

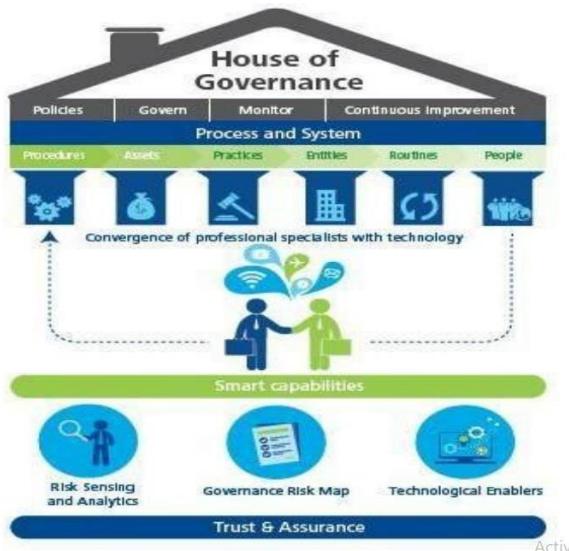
Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan

² Cohen, Boyd. (2013). What exactly is a Smart City? <http://www.boydcohen.com/smartcities.htm>

³ Supangkat, Suhono Harso, (2015). Smart Community for Smart City.

modal entrepreneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif).⁴ Konsep Smart City sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern

untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.⁵



Gambar 2.7 Konsep House of Governance

Perencanaan Smart Governance merupakan ujung tombak perencanaan Smart City karena Smart City dimulai dengan adanya *smart governance*. Tanpa adanya *smart governance* mustahil untuk mewujudkan Smart City⁶ (Scytl, 2015) Sehingga perencanaan *smart governance* haruslah mengacu pada konsep Smart City dan konsep perencanaan tata kelola yang banyak dikembangkan dengan cara

menggunakan framework-framework yang ada. Sebagai bahan perbandingan, pemerintah Singapura membuat perencanaan *smart governance* dengan mengedepankan tingkat kapabilitas sebagai indikator utama yang menitikberatkan pada tersedianya *house of governance*.⁷

Dalam lingkup Kabupaten Deli Serdang, pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah memanfaatkan memanfaatkan 14 aplikasi guna menunjang pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai urusan pemerintahan namun Interoperabilitas Sistem Informasi belum terwujud sehingga data yang dihasilkan dalam suatu informasi di sektor tertentu belum dapat ditransfer untuk dimanfaatkan di sistem informasi lain.

Ketersediaan jaringan *broadband access* untuk seluruh kantor pemerintahan terpusat dengan kapasitas 300 Mbps yang didistribusikan dari dinas Kominfo ke semua OPD di Pemkab Deli Serdang. Ketersediaan Data Center didukung 8 (delapan) server yang dikelola oleh Dinas Kominfo sedangkan Data Center Recovery difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan melalui ketersediaan 4 (empat) server. Selain itu, Pemkab Deli Serdang telah memiliki CCTV yang telah terpasang di 12 titik. Ditinjau dari sumber daya

⁴Kourtit, Karima & Nijkamp, Peter (2012).Smart cities in the innovation age. The European Journal of Social Science Research, Vol.25, Juni 2012, 93-95. Routledge

⁵Schaffers, Hans. (2010). Smart Cities and the Future Internet: Towards Collaboration Models for Open and User Driven Innovation Ecosystems, FIA Ghent, "Smart Cities and Future Internet Experimentation", December 16th 2010. Lazaroiu, George Cristian and Roscia, Mariacristina. 2012. Definition methodology for the smart cities model. Elsevier Ltd

⁶Scytl. (2015). Scytl Smart Governance for Smart Cities. Setiawan, H. (2013). Metode Audit Tata Kelola Teknologi

⁷Delloite. (2015). Smart Governance in a Smart Nation A Singapore perspective.

pemerintahan, aparatur dengan pendidikan S2 ke atas cukup tinggi mencapai 3,53% dengan jumlah pegawai sebanyak 459 orang sedangkan pegawai dengan latar belakang TIK mencapai 182 pegawai.

Ditinjau dari sektor pelayanan publik, ketunggalan identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan mencapai 1.082.632 jiwa atau 85% dengan interpretasi tinggi. Investasi Kabupaten Deli Serdang di sektor penanaman modal asing tertinggi di Sumatera Utara dengan nilai Rp 3.148.878,94 (juta) dan peringkat peringkat ke-4 dengan nilai investasi Rp 149.668,10 (juta) di sektor penanaman modal dalam negeri menunjukkan tingginya indeks *Easy of Doing Business* atau kemudahan dalam memulai usaha yang ditunjang dengan performa pelayanan perizinan yang baik dan kepastian hukum. Adapun pengaduan masyarakat telah diakomodasi dalam Puspa Deli yang menyediakan kanal Lapor SP4N sehingga masyarakat memiliki akses untuk menelusuri penyelesaian pengaduannya;

Memperhatikan sasaran prioritas di bidang tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pelayanan publik, meningkatnya kualitas sdm aparatur pemerintah, meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat, keamanan dan penegakan hukum maka strategi prioritas **Deli Serdang Smart Governance** adalah:

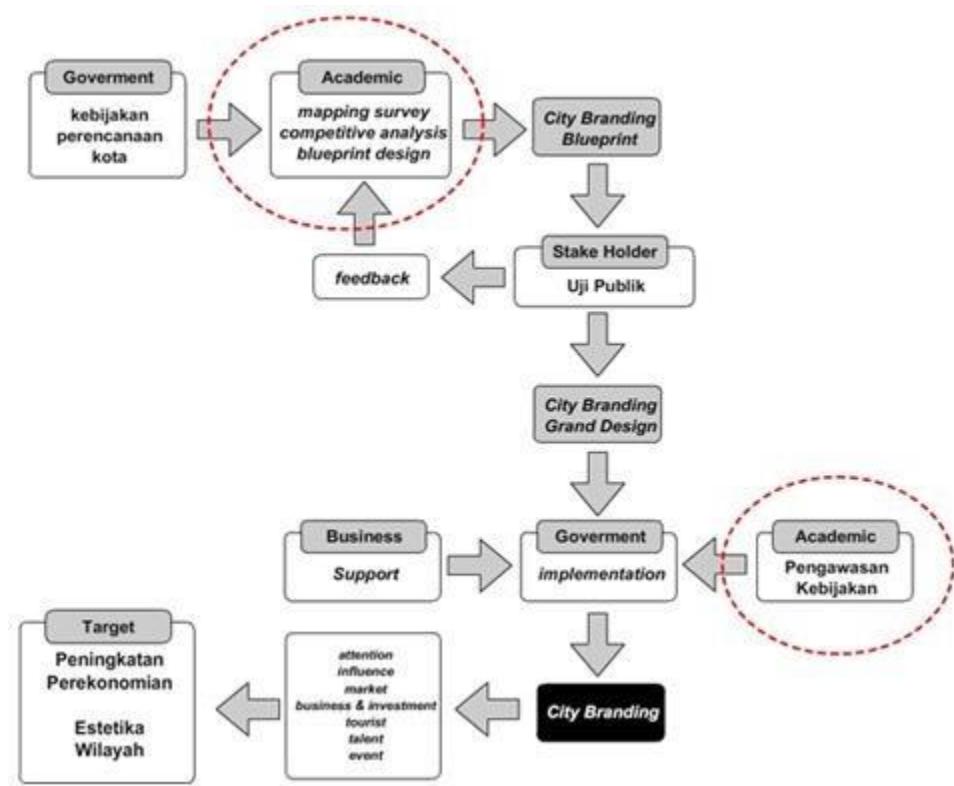
Smart Governance



Sub Pilar Dimensi	Strategi
Pelayanan Publik (Public Service)	G.1. Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital berbasis ketunggalan identitas
Manajemen Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy)	G.2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi dan pengembangan Deli Serdang <i>Big Data</i>
Efisien Kebijakan Publik (public Policy)	G.3. Peningkatan kualitas kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah

Dimensi kedua dalam pengembangan Smart City adalah **Smart Branding**. Pengembangan *branding* di suatu daerah adalah suatu strategi untuk mendorong aktivitas perekonomian dengan menarik minat investor maupun kunjungan wisatawan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara luas, *branding* daerah menitikberatkan dalam *geographic branding* atau regional bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang serta *cultural branding* mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari lokasi tertentu atau kebangsaan. Konsep *smart branding* memiliki kemiripan dengan konsep *smart branding* di dalam korporasi yaitu bertujuan untuk untuk mananamkan citra di masyarakat bahkan konsumennya dimana Ekuitas merek sebagai suatu *branding* merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan dan para pelanggan perusahaan. (David A. Aaker, 1997)



Gambar 2.8 Pengembangan City Branding

Dalam lingkup Kabupaten Deli Serdang, Deli Serdang merupakan *hinterland* Kawasan Perkotaan Mebidangro atau Medan Raya dimana sekitar 82,78% wilayah Mebidangro berada di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai daerah penyangga Medan Raya, Deli Serdang memiliki konektivitas daerah yang strategis dan terintegrasi dengan sistem logistik nasional melalui Bandara Internasional Kualanamu dengan pengembangan konsep kawasan aerotropolis yang berintegrasi dengan dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Medan, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara. Di sektor pariwisata, Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi wisata alam yang sangat beragam dengan 113 destinasi wisata namun tingkat okupansi hunian kamar hotel masih rendah dengan rata-rata sebesar 35,26 persen. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang dengan rata-rata 29,92 persen dan hotel melati dengan rata-rata 37,91 persen. Sedangkan kontribusi penyediaan akomodasi

dan makan minum sebagai pendukung pariwisata masih rendah dibandingkan sektor unggulan lain yakni mencapai 2,7% dari total PDRB.

Memperhatikan sasaran prioritas di dimensi *smart branding* yaitu meningkatnya investasi yang padat karya, meningkatnya peran koperasi usaha mikro kecil menengah (KUMKM), meningkatnya peran sektor pariwisata, meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya maka strategi prioritas **Deli Serdang Smart Branding** adalah:

Smart Branding



Sub Pilar Dimensi	Strategi
Tourism Branding	B.1. Pengembangan destinasiwisata yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dengan tagline “mempesona”
Business Branding	B.2. Peningkatan Deli Serdang <i>easy of doing business</i> serta ekosistem bisnis daerah yang atraktif, interaktif, dan informatif melalui pengembangan platform <i>Business and Investment Lounge</i>
City Appearance Branding	B.3. Pembangunan Landmark Kota Deli kawasan aerotropolis, pusat bisnis, dan Kawasan Industri <i>hinterland</i> Medan Raya

Di dimensi perekonomian, *smart economy* meliputi dua hal yaitu proses inovasi dan kemampuan daya saing yang berguna untuk meningkatkan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar. Pengelolaan ekonomi pada suatu daerah/ negara hendaknya dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi, ekonomi tidak hanya berkaitan dengan barang atau jasa, tapi juga inovasi, kemampuan bersaing, pendidikan dan kewirausahaan. Di negara Indonesia sendiri *smart economy* penting diterapkan karena negara Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, sehingga jika dikelola dengan baik bukan tidak mungkin perekonomian negara akan meningkat. Berbagai kebijakan menuju *smart economy* juga sudah disusun berdasarkan RPJMN 2015 – 2019. Seperti mengembangkan pencitraan kota berbasis produk unggulan, sdm unggulan, dan karakter sosial budaya lokal. Tertera juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan inovasi SDM dalam inovasi dan kewirausahaan. Mengembangkan peran layanan sistem informasi dari semua industri, juga akan mendorong terciptanya *smart economy*, dalam hal ini adalah *e-business*. Selanjutnya, berjalannya proses elektronifikasi dimana pembayaran semua menggunakan transaksi non tunai.

Dalam konstelasi perekonomian Kabupaten Deli Serdang, PDRB Deli Serdang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 mencapai 93,19 triliun rupiah. Perannya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 13,49 persen, kedua tertinggi setelah Kota Medan yang berperan sebesar 29,57 persen terhadap PDRB

Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi PDRB terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, yang mencapai sebesar 32,22 persen. Pendapatan per Kapita mengacu atas dasar harga berlaku mencapai 44,07 juta rupiah atau mencapai 3,67 juta rupiah per bulan berada di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018 sebesar Rp 2.720.100,00. Laju pertumbuhan ekonomi Deli Serdang tahun 2017 mencapai 5,10 persen di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi selaras dengan pembangunan manusia yang meningkat secara konsisten menuju level 73,94 dan Persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,62%. Namun di sektor ketenagakerjaan, angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah di Deli Serdang masih besar. Persentase angkatan kerja golongan ini mencapai 19,67 persen, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP dan SMA masing-masing sekitar 24,75 persen dan 44,04 persen.

Ditinjau dari pendekatan kawasan, Deli Serdang merupakan *hinterland* Kawasan Perkotaan Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) atau disebut juga Medan Raya dimana sekitar 82,78 % wilayah Mebidangro berada di Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang, memiliki konektivitas daerah yang strategis dan terintegrasi dengan sistem logistik nasional melalui Bandara Internasional Kualanamu dengan pengembangan konsep kawasan aerotropolis yang berintegrasi dengan dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Medan, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Kondisi geo-ekonomi yang strategis ini menjadi peluang bagi Deli Serdang sebagai bagian rute bisnis kargo internasional yang mencakup pemangkasan biaya logistik untuk menjadi langsung rute pelayaran *Interstate*.

Memperhatikan sasaran prioritas di dimensi ekonomi yaitu mewujudkan pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan, jembatan, dan irigasi, meningkatnya investasi yang padat karya, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya peran koperasi usaha mikro kecil menengah (KUMKM), meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan jasa, meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan, meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan, maka strategi prioritas **Deli Serdang Smart Economy** adalah:

	Smart Economy
Sub Pilar Dimensi	Strategi
Industri Berdaya Saing (Industry)	Ec.1. Pengembangan Kawasan Industri didukung peningkatan kamantapan infrastruktur dan konektivitas daerah melalui kawasan aerotropolis Kualanamu.
Kesejahteraan Rakyat	Ec.2. Pengembangan nilai tambah kawasan industri didukung

Sub Pilar Dimensi	Strategi
(Welfare)	<p>peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing</p> <p>Ec.3. Penguatan kapasitas usaha mikro, ekonomi lokal, serta pengentasan kemiskinan bersasaran</p>
Transaksi Keuangan (Transaction)	Ec.4. Pengembangan platform e-commerce dan transaksi pemerintahan dengan mekanisme elektronifikasi

Pengembangan selanjutnya adalah dimensi *Smart Living*. *Smart Living* bertujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup (*quality of life*) dan budaya (*culture*) yang lebih baik dan pintar (*smart*). Dimana untuk mewujudkan itu semua perlu memenuhi fasilitas pendidikan yang memadai untuk masyarakat seperti, penyediaan internet gratis, CCTV terpasang di tempat umum, adanya sistem informasi sekolah dan perguruan tinggi, dsb. Penyediaan sarana dan prasarana, dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif seperti, adanya sistem informasi pariwisata berbasis web dan mobile, sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai seperti, tersedia komputer publik di tempat umum, tersedia infrastruktur jaringan komputer yang memadai. *Smart living* adalah pengembangan kelayakan taraf hidup masyarakat dengan mengintegrasikan segmen dalam suatu kota yang saling mempengaruhi untuk membentuk *livable city*.

*"The coin of livability has two faces. Livelihood is one of them. Ecological sustainability is the other. Livelihood means jobs close enough to decent housing with wages commensurate with rents and access to the services that make for a healthful habitat. Livelihoods must also be sustainable. If the quest for jobs and housing is solved in ways that progressively and irreparably degrade the environment of the city, then the livelihood problem is not really being solved. Ecological degradation buys livelihood at the expense of quality of life, with citizens forced to trade green space and breathable air for wages. To be livable, a city must put both sides of the coin together, providing livelihoods for its citizens, ordinary as well as affluent, in ways that preserve the quality of the environment."*⁸

Di lingkup pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pengaturan wilayah secara rinci dalam rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai penerjemahan RTRW belum diimplementasikan. Namun, di sisi harmonisasi tata ruang, terdapat pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu, Kawasan Industri lain dan

⁸ P. Evans, 2002 dikutip dari Cities Allians. 2007. Livable Cities The Benefits of Urban Environmental Planning

pengembang Kota Mandiri Kuala Bekala. Di sektor pelayanan kesehatan, angka harapan hidup mencapai 71,06 tahun lebih tinggi di atas rata-rata provinsi Sumatera Utara 68,33 tahun. Sedangkan angka kematian ibu, dari 44.724 kelahiran hidup terdapat 19 kematian ibu, kondisi ini merupakan tertinggi kedua setelah Kabupaten Mandailing Natal dengan 21 kasus kematian. Jumlah kematian neonatal mencapai 70 kasus, kasus kematian bayi mencapai 91, kematian anak balita mencapai 22, dan kematian balita mencapai 133. Di sisi konektivitas, memiliki konektivitas daerah yang strategis dan terintegrasi dengan sistem logistik nasional melalui Bandara Internasional Kualanamu dengan pengembangan konsep kawasan aerotropolis yang berintegrasi dengan dua pelabuhan sedangkan namun angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor masih cukup tinggi mencapai 634 sepanjang 2017 stagnan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 635 kejadian.

Memperhatikan sasaran prioritas di dimensi *living* yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga dan sarana/ prasarana olah raga yang berkualitas, meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, mewujudkan pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan, jembatan, dan irigasi, terpenuhinya SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan, maka strategi prioritas **Deli Serdang Smart Living** adalah:

Smart Living



Sub Pilar Dimensi	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony)	L.1. Pembangunan keselarasan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota layak huni dan berdaya saing.
Prasarana Kesehatan (Health)	L.2. Peningkatan atribusi pelayanan kesehatan secara inklusif promotif, preventif, maupun preventif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan suprastruktur pendukung pelayanan kesehatan.
Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)	L.3. Penguatan konektivitas daerah yang ramah lingkungan didukung pengembangan <i>smart mobility</i> penduduk dan sistem logistik daerah.

Dimensi *smart society* menitikberatkan dalam masyarakat pintar meliputi kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal manusia (*human capital*) maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan

kemampuan dan ketrampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan. Masyarakat merupakan bagian penting dari terciptanya Smart City, karena dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang dulu mulai ditinggalkan. Masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, serta menjadi pengguna kota yang aktif. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya Smart City.

Dalam pengembangan *society* Kabupaten Deli Serdang, angka partisipasi murni SD/ MI mencapai 95,73% sedangkan angka partisipasi kasar mencapai 106,62%. Adapun angka partisipasi murni SMP/ MTs masih rendah mencapai 72,52% sedangkan angka partisipasi kasar mencapai 84,47%. Hal ini selurus dengan angka partisipasi murni SMA/ MK/ MA mencapai 67,84% dengan angka partisipasi kasar mencapai 112,78%. Rata-rata lama sekolah yang saat ini mencapai 9,70 namun masih dibawah harapan lama sekolah mencapai 12,90 tahun. Di sisi interaksi sosial masyarakat secara digital telah didukung kesiapan sarana digital melalui *broadband access* sedangkan interaksi sosial masyarakat secara fisik didukung terutama ketersediaan Ruang Terbuka Hijau serta Pemkab Deli Serdang telah memiliki CCTV yang telah terpasang di 12 titik. Dari segi kebencanaan, pemerintah daerah dan masyarakat belum mengembangkan pelayanan kegawatdaruratan bencana yang terpadu dan terintegrasi serta dilengkapi *early warning system* sedangkan ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran sebagaimana bencana pada tahun 2017 meliputi banjir 1 kejadian, puting beliung 14 kejadian, longsor 3 kejadian, gempa 1 kejadian, dan kebakaran 8 kejadian.

Memperhatikan sasaran prioritas di dimensi *society* yaitu meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, meningkatnya implementasi norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga dan sarana/ prasarana olah raga yang berkualitas meningkatnya kualitas pelayanan, pemberdayaan, perlindungan masyarakat kurang mampu dan terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS, meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat, keamanan dan penegakan hukum, maka strategi prioritas **Deli Serdang Smart Society** adalah:

	Smart Society
Sub Pilar Dimensi	Strategi

Interaksi Masyarakat yang Efisien (Community)	S.1. Pembangunan platform dan kanal interaksi sosial Deli Serdang santun dan edukatif.
Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)	S.2. Peningkatan atribusi pelayanan pendidikan yang inklusif melalui keterlibatan orang tua dan masyarakat untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan suprastruktur pendukung pelayanan pendidikan.
Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	S.3. Pembangunan Deli Serdang Crisis Center untuk meningkatkan responsifitas didukung kemudahan dan kepastian pelayanan kegawatdaruratan.

Pengembangan dimensi terakhir adalah *Smart Environment*. Cook dan Das mendefinisikan *smart environment* sebagai "dunia kecil dimana berbagai jenis perangkat pintar terus bekerja untuk membuat hidup penduduk lebih nyaman."⁹ Hal ini bertujuan untuk memenuhi pengalaman individu dari setiap lingkungan, dengan mengganti pekerjaan berbahaya, pekerjaan fisik, dan tugas yang berulang dengan agen otomatis. Poslad membedakan tiga macam *Smart Environment* untuk sistem, layanan dan perangkat: meliputi lingkungan virtual (atau didistribusikan) komputasi, lingkungan fisik dan lingkungan manusia, atau kombinasi hibrida ini.¹⁰ Di lingkup pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Deli Serdang telah mengembangkan sekolah ramah lingkungan sebanyak 939 sekolah atau 44,73% pada tahun 2017. Pengelolaan persampahan didukung dengan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Namorubejulu, TPA Tadukan Raga dan sedang dikembangkan TPA Labuhan Deli namun fasilitas pelayanan persampahan sebagian besar telah rusak sehingga penangan sampah belum optimal meningkat. Adapun Desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat sejumlah 66 Desa atau 16,75%. Selain itu, kontribusi PDRB terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, yang mencapai sebesar 32,22 persen ditambah mobilitas penduduk yang padat (*Rapid Mobility*) dari daerah *hinterland* Medan Metropolitan area menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerugian ekonomi, dan polusi udara.

Memperhatikan sasaran prioritas di dimensi *environment* yaitu meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan, jembatan, dan irigasi, terpenuhinya sdm bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meningkatnya infrastruktur dasar permukiman dan pelayanan persampahan, meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup maka strategi prioritas **Deli Serdang Smart Environment** adalah:

⁹Cook, Diane; Das, Sajal (2005). Smart Environments: Technology, Protocols and Applications. Wiley-Interscience. ISBN 0-471-54448-5.

¹⁰Poslad, Stefan (2009). Ubiquitous Computing Smart Devices, Smart Environments and Smart Interaction.Wiley. ISBN 978-0-470-03560-3.



Sub Pilar Dimensi	Strategi
Program Proteksi Lingkungan (Protection)	En.1. Peningkatan kepastian hukum dan keterbukaan informasi pengelolaan lingkungan hidup guna tatakelola sumber daya air, tanah, dan udara yang berkelanjutan.
Tata Kelola Sampah dan Limbah	En.2. Pengelolaan sampah dan limbah berkelanjutan didukung perluasan jangkauan dan kapasitas pengelolahan persampahan dan limbah rumah tangga maupun industri,
Tata Kelola Energy	En.3. Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan

Pengembangan Strategi Deli Serdang Smart City di 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*) merupakan telaah dari analisa SWOT sebagaimana dijabarkan dalam Buku 1 Masterplan Smart City Chapter Analisa Kesenjangan. Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.¹¹

Menurut Pearce dan Robinson (2011:140) menjelaskan *Strength-Weakness-Opportunities-Threats* (SWOT) adalah “*acronym for the internal Strengths and Weaknesses of a firm, and the environmental Opportunities and Threats facing that firm. SWOT analysis is a technique through which managers create a quick overview of a company's strategic situation*”.¹² Menurut David (2011:178) mendefinisikan “*SWOT is an important matching tool that helps manager develop four types of strategies: SO (Strength-Opportunities) Strategies, WO (Weaknesses-Opportunities) Strategies, ST (Strength-Threats) and WT (Weakness-Threats) Strategies*”. SWOT dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT merupakan alat pencocokan yang dapat membantu manajer untuk mengembangkan strategi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

SWOT matriks dapat dibagi menjadi 4 strategi, keempat strategi yaitu:

- (1) Strategi SO (kekuatan – peluang) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dan peluang eksternal. Dalam hal ini setiap

¹¹ David, Fred R, 2011. Strategic Management, Buku 1. Edisi 12 Jakarta

¹² Pearce II, John A., dan Robinson, Richard B. 2011. Strategic Management: Formulation, Implementation and Control, Twelfth Edition. New York: Mc Graw Hill

perusahaan atau manajer pasti menginginkan kekuatan internal yang dimiliki dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai tren dan kejadian eksternal.

- (2) Strategi WO (kelemahan – peluang) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang banyak perusahaan melihat peluang-peluang besar muncul, namun perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalangi dalam memanfaatkan peluang tersebut.
- (3) Strategi ST (kekuatan – ancaman) menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Ini tidak berarti bahwa organisasi yang kuat harus selalu memenuhi ancaman dalam lingkungan eksternal.
- (4) Strategi WT (kelemahan – ancaman) merupakan taktif defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan, sehingga perusahaan dalam keadaan seperti ini harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan *merger*, pencuitan, menyatakan diri bangkrut, atau memilih likuidasi.

Analisis SWOT paling umum digunakan sebagai kerangka logis yang mengarahkan pembahasan dan refleksi mengenai situasi dan alternatif dasar suatu perusahaan. Diagram analisis SWOT dapat dilihat sebagaimana berikut:

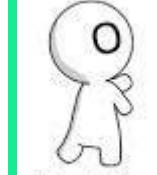


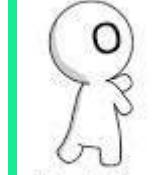
Gambar 2.9
Kerangka Analisis SWOT

Berdasarkan analisa perumusan strategi sebagaimana dimaksud maka penjabaran strategi yang dirumuskan dalam Deli Serdang Smart City memiliki korelasi terhadap analisa kesenjangan yang dijabarkan sebagaimana berikut:

Matriks Sinkronisasi Strategi Deli Serdang Smart City dan Analisis Kesenjangan

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Analisa Kesenjangan			
		 S Strengths	 W Weaknesses	 O Opportunities	 T Threats
Sub Pilar Dimensi	Smart Government				
Pelayanan Publik (Public Service)	G.1. Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital berbasis ketunggalan identitas	1 2 3 6 7	1 4 5 6	1 4 5 6	1 2 3 6
Manajemen Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy)	G.2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi dan pengembangan Deli Serdang <i>Big Data</i>	1 2 3 4 5 7	1 2 3 4 5	1 2 4 5 6	4 5 6
Efisien Kebijakan Publik (public Policy)	G.3. Peningkatan kualitas kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah	1 2 3 5 8	1 4	1 3	2 6
Sub Pilar Dimensi	Smart Branding				
Tourism Branding	B.1. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dengan tagline "mempesona"	1 2 3 4	1 4 5	1 2 3 4	1 3 4 6
Business Branding	B.2. Peningkatan Deli Serdang <i>easy of doing business</i> serta ekosistem bisnis daerah yang atraktif,	1 2 3 4 6	1 4 5	1 2 3 4	1 2 5 6

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Analisa Kesenjangan			
		 S Strengths	 W Weaknesses	 O Opportunities	 T Threats
	interaktif, dan informatif melalui pengembangan platform <i>Business and Investment Lounge</i>				
City Appearance Branding	B.3. Pembangunan Landmark Kota Deli kawasan aerotropolis, pusat bisnis, dan Kawasan Industri <i>hinterland</i> Medan Raya	3 4	3 4 5	2 3 5	5 6
Sub Pilar Dimensi	Smart Economy				
Industri Berdaya Saing (Industry)	Ec.1. Pengembangan Kawasan Industri didukung peningkatan kemantapan infrastruktur dan koneksi daerah melalui kawasan aerotropolis Kualanamu	1 2 5 7 10 11 12 13	1 2 5 8	1 2 3	1 3 4 5
Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	Ec.2. Pengembangan nilai tambah kawasan industri didukung peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing	1 2 5 7 8 10 11 12 14 15	1 2 5 6 8	1 2 3	1 2 3 4 5
	Ec.3. Penguatan kapasitas usaha mikro, ekonomi lokal, serta pengentasan kemiskinan bersasaran	3 4 5 6 7 8 9 10	1 4 5 7 8	1 6	1 3 5
Transaksi Keuangan (Transaction)	Ec.4. Pengembangan platform e-commerce dan transaksi pemerintahan dengan mekanisme elektronifikasi	3 4 5 6 7 8 9 10	1 4 5 7 8	1 4 5 6	1 3 5

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Analisa Kesenjangan			
		 S Strengths	 W Weaknesses	 O Opportunities	 T Threats
Sub Pilar Dimensi	Smart Living				
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony)	L.1. Pembangunan keselarasan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota layak huni dan berdaya saing	1 2	1 9	1 2	1 3 5
Prasarana Kesehatan (Health)	L.2. Peningkatan atribusi pelayanan kesehatan secara inklusif promotif, preventif, maupun preventif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan suprastruktur pendukung pelayanan kesehatan	3 4 5 6	2 3 4	1 2 3	2 3 5
Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)	L.3. Penguatan konektivitas daerah yang ramah lingkungan didukung pengembangan <i>smart mobility</i> penduduk dan sistem logistik daerah	1 2 7	1 5 6 7 8 9	1 2 3 4	3 4 5
Sub Pilar Dimensi	Smart Society				
Interaksi Masyarakat yang Efisien (Community)	S.1. Pembangunan platform dan kanal interaksi sosial Deli Serdang santun dan edukatif	1 2	1 2	1 2 3 4 5	1 2 3 4 7

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Analisa Kesenjangan			
		 S Strengths	 W Weaknesses	 O Opportunities	 T Threats
Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)	S.2. Peningkatan atribusi pelayanan pendidikan yang inklusif melalui pelibatan orang tua dan masyarakat untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan suprastruktur pendukung pelayanan pendidikan	3 4	3 4 5 6	1 2 3 4 5	1 4 7
Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	S.3. Pembangunan Deli Serdang <i>Crisis Center</i> untuk meningkatkan responsifitas didukung kemudahan dan kepastian pelayanan kegawatdarurat	5 6	7	1 2 5 6	1 3 6 7
Sub Pilar Dimensi	Smart Environtment				
Program Proteksi Lingkungan (Protection)	En.4. Peningkatan kepastian hukum dan keterbukaan informasi pengelolaan lingkungan hidup guna tata kelola sumber daya air, tanah, dan udara yang berkelanjutan	1 4	1 2	1 2 4	1 3 4 5 6
Tata Kelola Sampah dan Limbah	En.5. Pengelolaan sampah dan limbah berkelanjutan didukung perluasan jangkauan dan kapasitas pengelolahan persampahan dan limbah rumah tangga maupun industry	2 3 4	3 4 5	1 3 4	2 4 6
Tata Kelola Energy	En.6. Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan	1	6	1 2 3 4	2 6

Rencana Aksi Deli Serdang Smart City



Rencana Aksi Deli Serdang Smart City adalah penjabaran strategi-strategi di tiap dimensi dalam bentuk rencana operasional yang secara teknis dapat dilaksanakan oleh stakeholder pembangunan (perangkat daerah, badan usaha milik daerah, akademisi, *non government organization*, dan masyarakat). Perumusan rencana aksi Deli Serdang Smart City sebagaimana berikut:

Smart Governance



Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Pelayanan Publik (Public Service)	G.1. Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital berbasis ketunggalan identitas	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan tim teknis pengembangan pelayanan publik digital yang terintegrasi2. Penelaahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen tata laksana pelayanan publik3. Penyusunan inventarisasi formulir pelayanan publik dan elemen data yang dihasilkan oleh pelayanan publik4. Pelaksanaan alih media formulir pelayanan konvensional ke formulir digital melalui aplikasi GEDESADARKU5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan sebagai

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<p>penerima manfaat program pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Penyusunan basis data formulir dan elemen data pelayanan publik yang diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan 7. Penyediaan akses <i>web service</i> untuk OPD atau Lembaga Pengguna dalam pemanfaatan data NIK/kependudukan melalui Sistem Data Warehouse (DWH) Dukcapil 8. Perumusan regulasi pendukung pelayanan publik dalam rangka tata laksana pelayanan publik digital 9. Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan atau pelayanan OPD 10. Diseminasi dan peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan publik digital 11. Perumusn regulasi pendukung pelayanan publik dalam rangka tata laksana pelayanan khusus perizinan dalam pelaksanaan <i>Online Single Submission</i> (OSS) 12. Pembangunan infrastruktur pendukung <i>Online Single Submission</i> 13. Diseminasi dan peningkatan kapasitas petugas layanan <i>Online Single Submission</i> 14. Pembangunan Mall Pelayanan Publik Deli Serdang 15. Mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat melalui penempatan ASN Disdukcapil di kantor-kantor Kecamatan melalui TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) 16. Pelayanan Siap Antar Dokumen Kependudukan (SADOKU) kepada masyarakat yang membutuhkan seperti warga binaan dan kelompok yang rentan (orang sakit, lansia, difabel, dan disabilitas)

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<p>17. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis ketunggalan identitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi akte kelahiran dan kematian b. Aplikasi proses cek KTP c. Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online d. <i>Dashboard</i> Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online e. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKSNG) untuk Verifikasi BDT dan Pelayanan Sosial f. Sistem aplikasi bantuan pangan (situpang) g. <i>Dashboard</i> Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial h. Aplikasi e-Pajak dan Retribusi Daerah i. <i>Dashboard</i> e-Pajak dan Retribusi Daerah j. Lacak Deli Serdang k. Aplikasi Perizinan Online l. SIMPATEN m. Pelaksanaan <i>Online Single Submission</i> (OSS) n. Pengembangan <i>Dashboard Online Single Submission</i> (OSS) o. Aplikasi Elektronik Pendapatan Asli Daerah Terintegrasi (E-Padi) p. Aplikasi Sarana Layanan Administrasi Kependudukan Deli Serdang (Salak Deli) q. Pelaksanaan Sistem Informasi Bersalin Dapat Akta Kelahiran dan KIA (Silinda Kelana)
Manajemen Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy)	G.2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi dan pengembangan Deli Serdang <i>Big Data</i>	<p>18. Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD dan penetapan RPJMD Deli Serdang 2020 – 2025</p> <p>19. Penyusunan <i>Grand Design</i> penerapan Norma Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)</p>

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<p>20. Perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan <i>Sustainable Development Goal's (SDG's)</i> 2016 – 2030</p> <p>21. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi</p> <p>22. Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan</p> <p>23. Penyusunan atau review OPD berbasis urusan penyelenggaraan pemerintahan termutakhir</p> <p>24. Penyusunan regulasi e-Government terkait pengembangan interoperabilitas sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</p> <p>25. Penyusunan tim sistem informasi Deli Serdang</p> <p>26. Pelaksanaan integrasi sistem informasi seluruh OPD</p> <p>27. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>28. Pengembangan sistem informasi pemerintahan berbasis interoperabilitas sistem Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. e-planning (Perencanaan) b. e-budgeting (Penganggaran) c. e-inventory (Pengelolaan Aset berbasis Akrual) d. e-procurement (Pengadaan Barang dan Jasa) e. e-monitoring (Monitoring dan Evaluasi) f. e- AKIP (Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mulai dari perencanaan, perjanjian kinerja, pengendalian, hingga pelaporan) g. Sistem Informasi Kepegawaian h. Dashboard Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> i. Sistem Informasi Keuangan Desa j. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa melalui INTIF Desa k. Kasi-Kasi Uang (Aplikasi Verifikasi Dokumentasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) l. Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan m. Pengembangan Website Desa n. Dashboard Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 29. Pengembangan portal layanan informasi publik terintegrasi (Deli Serdang Single Window) 30. Pelaksanaan inventarisasi elemen data pembangunan daerah dan integrasi elemen data pembangunan dan pelayanan publik digital 31. Perumusan Glosarium elemen data pembangunan daerah 32. Perumusan <i>Grand Design</i> pengembangan Deli Serdang <i>Big Data</i> 33. Perumusan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan pengolahan data OPD 34. Penyusunan sistem informasi dan <i>dashboard</i> Deli Serdang <i>Big Data</i> 35. Integrasi <i>Dashboard</i> Sistem Informasi terhadap Deli Serdang <i>Command Center</i> 36. Peningkatan infrastruktur IT (<i>back office</i>) kecamatan 37. Peningkatan SDM kecamatan dalam pemanfaatan IT

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Efisiensi Kebijakan Publik (public Policy)	<p>G.3. Peningkatan kualitas kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah</p>	<p>38. Pengalihmediaan dokumen atau regulasi daerah yang tidak dikecualikan</p> <p>39. Penyusunan Sistem Informasi Deli Serdang Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) didukung <i>tracking</i> sistem</p> <p>40. Publikasi dokumen pembangunan dan produk hukum daerah dalam rangka <i>Open Government Partnership</i></p> <p>41. Pengembangan sistem informasi Media Sosial dan Media Online analitik (Stelsel aktif)</p> <p>42. Pengintegrasian kanal pengaduan ke dalam Lapor SP4N</p> <p>43. Publikasi produk hukum melalui forum konsultasi publik</p> <p>44. Perbaikan pengeloaan administrasi kearsipan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) b. SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) <p>45. Pembangunan data base informasi kearsipan melalui Aplikasi "Gerakan Deli Serdang Tertib Arsip (GEDESADARKU) <i>off line app</i></p>



Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Tourism Branding	<p>B.1. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dengan tagline “mempesona”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan atau Review Rencana Induk Pariwisata Daerah dan Rencana Pengembangan Pariwisata Desa 2. Pelaksanaan kemitraan pengembangan kapasitas terhadap pelaku usaha di lokasi wisata 3. Pembangunan Infrastruktur pendukung Destinasi Wisata 4. Pengembangan destinasi wisata Kenang Lemu (Kenali Deli Serdang Lewat Museum) 5. Pengembangan destinasi wisata tematik berbasis komunitas Desa dan kawasan bisnis → pengembangan Si DEWI yang Mempesona (Potensi Desa Wisata yang Mempesona) 6. Pembangunan infrastruktur <i>Skate Park</i> di lingkungan Taman Buah Deli Serdang 7. Pengembangan Aplikasi Daporaniyata: Aplikasi yang merupakan database untuk mendukung kegiatan di Disbudporapar 8. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan Deli Serdang Tourism dengan prioritas <i>content</i> informasi destinasi wisata, konektivitas, akomodasi, kuliner dan <i>calendar event</i>

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<p>9. Pembangunan Aplikasi Delipedia Aplikasi yang memberikan informasi tentang destinasi wisata dan menyediakan pintasan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang</p>
Business Branding	B.2. Peningkatan Deli Serdang <i>easy of doing business</i> serta ekosistem bisnis daerah yang atraktif, interaktif, dan informatif melalui pengembangan platform <i>Business and Investment Lounge</i>	<p>10. Pelaksanaan Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i> atau pertemuan kepala daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat</p> <p>11. Pembangunan dan pemanfaatan Ruang publik sebagai Ruang Eksibisi, promosi produk lokal, dan <i>co-working space</i></p> <p>12. Pengembangan platform <i>e-commerce</i> Deli Serdang Mall sebagai platform promosi dan transaksi digital (penyempurnaan aplikasi berbasis <i>mobile</i> Deli Serdang Mall)</p> <p>13. Pembangunan Portal Investasi Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i></p>
City Appearance Branding	B.3. Pembangunan Landmark Kota Deli kawasan aerotropolis, pusat bisnis, dan Kawasan Industri <i>hinterland</i> Medan Raya	<p>14. Pembangunan Landmark Deli Serdang berbasis kawasan industri</p> <p>15. Pembangunan Landmark Deli Serdang berbasis kawasan aerotropolis dan pusat bisnis</p> <p>16. Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Hias Air Tawar</p> <p>17. Pelaksanaan pemetaan batas wilayah melalui toponomi berbasis <i>Geographic Information System (GIS)</i></p> <p>18. Restorasi dan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya</p>



Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Industri Berdaya Saing (Industry)	Ec.1. Pengembangan Kawasan Industri didukung peningkatan kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah melalui kawasan aerotropolis Kualanamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan/atau review masterplan jalan dan penetapan status jalan 2. Peningkatan kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan poros Desa, jalan Desa. 3. Pembangunan Kawasan Industri 4. Pemenuhan kebutuhan air baku industri dan tenaga listrik kawasan industri terintegrasi 5. Penaataan utilitas jaringan telekomunikasi
Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	Ec.2. Pengembangan nilai tambah kawasan industri didukung peningkatan peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelatihan ketenagakerjaan berbasis <i>demand driven</i> atau kebutuhan dunia usaha dan berbasis kewirasahaan 7. Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Melalui Daring b. Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK Online) c. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri d. Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan
	Ec.3. Penguatan kapasitas usaha mikro, ekonomi lokal, serta pengentasan	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pendampingan pengembang pelaku usaha <i>start up</i> dan usaha mikro melalui inkubasi bisnis

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
	kemiskinan bersasaran	<p>9. Pembangunan Sistem Informasi Wirausaha Terpadu Deli Serdang</p> <p>10. Pengembangan sub-terminal agrobisnis</p> <p>11. Pemberian hibah bersaing untuk inovasi berbasis kewirausahaan atau usaha produktif</p> <p>12. Perluasan akses pembiayaan UMKM terhadap perbankan</p> <p>13. Pengembangan aplikasi IUMK DS Melalui Online (Ijin Usaha Mikro Kecil Deli Serdang) Melalui Online → aplikasi untuk membantu pengusaha mikro kecil mengajukan ijin secara online</p> <p>14. Penelaahan kembali dan perumusan regulasi teknis pengelolaan ekonomi lokal perdesaan melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau BUMADEs (Badan Usaha Milik Antar Desa);</p> <p>15. Pemetaan potensi perdesaan dan kawasan perdesaan dalam rangka pemetaan segmen bisnis ekonomi lokal desa</p> <p>16. Pembentukan BUMDesa dan BUMADEsa</p> <p>17. Pelatihan, pendampingan, dan monitoring dalam pengembangan kegiatan usaha BUMDesa dan BUMADEsa</p> <p>18. Pengembangan sistem informasi potensi perdesaan yang terintegrasi dengan portal peta Investasi Daerah</p> <p>19. Pelaksanaan verivali BDT (Basis Data Terpadu) Kemiskinan yang</p>

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<p>terintegrasi dengan Deli Serdang <i>Big Data</i></p> <p>20. perumusan masterplan program unggulan pengentasan kemiskinan berbasis <i>pro poor planning, budgeting, and monitoring</i></p> <p>21. Pemberdayaan kelompok marginal melalui intervensi program unggulan pengentasan kemiskinan bersasaran</p> <p>22. Penurunan rumah tidak layak huni</p> <p>23. Penurunan kawasan kumuh</p> <p>24. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian dan perkebunan</p> <p>25. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)</p> <p>26. Pengembangan Kampung Organik</p> <p>27. Pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TICC)</p> <p>28. Pembangunan Aplikasi Galeri P3UD</p> <p>29. Sentra Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terintegrasi (SETANGKAI PADI)</p> <p>30. Petani Muda Andalan Sebagai Inkubator Pertanian Milenial (Pemuda Kaperle)</p>
Transaksi Keuangan (Transaction)	Ec.4. Pengembangan platform <i>e-commerce</i> dan transaksi pemerintahan dengan mekanisme elektronifikasi	<p>31. Pelatihan terhadap pelaku usaha dalam penerapan transaksi digital</p> <p>32. Elektronifikasi transaksi pemerintahan berbasis non tunai</p> <p>33. Penerapan e-retribusi di pasar</p>



Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony)	L.1. Pembangunan keselarasan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota layak huni dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan/atau review Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 3. Perumusan regulasi insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang 4. Smart Sistem Management Pengelolaan Jalan dan Drainase 5. Pengembangan Sistem Informasi pengendalian tata ruang berbasis Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan Portal Investasi Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i>
Prasarana Kesehatan (Health)	L.2. Peningkatan atribusi pelayanan kesehatan secara inklusif promotif dan preventif, maupun preventif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan suprastruktur pendukung pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) akselerasi Zero AKI-AKB 7. Pelaksanaan Gerakan ASI Ekslusif melalui Kampung ASI didukung pembentukan pusat kesehatan ibu dan anak di Desa 8. Pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat didukung PKK, UKS, dan organisasi kemasyarakatan. 9. Pembangunan aplikasi mobile SIAGA GENRE (Sistem Informasi Anak dan Gender Generasi Berencana) sebagai kanal distribusi informasi mengenai anak dan gender kepada masyarakat

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<p>10. Revitalisasi pengendalian penduduk melalui KB untuk menurunkan <i>Total Fertility Rate (TRF)</i> dan meningkatkan kesepertaan KB</p> <p>11. Perluasan akses air minum melalui jaringan PDAM dan akses air bersih non PDAM</p> <p>12. Optimalisasi sarana olahraga, pusat kesenian, budaya, serta ruang terbuka hijau di wilayah permukiman sebagai pusat kesehatan promotif dan preventif</p> <p>13. Pembangunan pusat pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan dan desa</p> <p>14. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>15. Penanganan aduan korban kekerasan perempuan dan anak melalui P2TP2A</p> <p>16. Inisiasi Desa Layak Anak</p> <p>17. Akreditasi puskesmas</p> <p>18. Pemenuhan rasio tenaga kesehatan melalui mekanisme formasi kepegawaian khusus dan pengembangan karir</p>

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<p>19. Pelayanan terpadu penangan kesehatan ibu hamil resiko tinggi (pemeriksaan penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan nifas)</p> <p>20. Pengembangan aplikasi berbasis mobile PIL KB MESRA (Pusat Informasi Pelayanan KB Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)</p> <p>21. Workshop Penanganan Komplikasi Neonatus bagi Dokter, Bidan,dan Perawat</p> <p>22. Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sadar Gizi</p> <p>23. Pemberian Makanan Tambahan untuk Penderita Gizi Buruk</p> <p>24. Pemenuhan universal coverage Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dai APBD, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok marginallainnya</p> <p>25. Pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis ketunggalan identitas mencakup informasi pelayanan kesehatan, alat kesehatan, kesediaan obat, peta fasilitas kesehatan, hotline kegawatdaruratan, hasil monitoring terhadap produk makanan dan minuman, serta data riset kesehatan dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Primary Care BPJS b. Aplikasi SIKDA

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> c. Aplikasi Keluarga Sehat d. Aplikasi Komunikasi Data e. Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) f. Aplikasi Satu Data Kesehatan (<i>Dashboard Pelaporan</i>) g. Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan e-de sehat h. <i>Dashboard</i> Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan e-de sehat i. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit j. <i>Dashboard</i> Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit k. Aplikasi <i>Clinical Reminder System</i> l. Penerapan Mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri RSUD <p>26. Pelayanan pendistribusian obat melalui pemanfaatan sistem informasi pendistribusian obat pasien (SIPOP).</p>
Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)	<p>L.3. Penguatan konektivitas daerah yang ramah lingkungan didukung pengembangan <i>smart mobility</i> penduduk dan sistem logistik daerah</p>	<p>27. Pelaksanaan transportasi massal dalam mendukung integrasi kawasan aerotropolis Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan KualaTanjung</p> <p>28. Pemberdayaan angkutan pedesaan</p> <p>29. Pembayaran <i>Bus Cashless</i></p> <p>30. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung konektivitas daerah ramah lingkungan dan gender</p> <p>31. Peningkatan kelancaran mobilitas penduduk melalui pengembangan <i>Automatic Traffic Control System (ATCS)</i> di titikkerawanan</p>

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<p>32. Pemetaan potensi parkir Parkir <i>On street</i> dan <i>Off Street</i></p> <p>33. Pembentukan Tim Yustisi penertiban Parkir Liar dan pengembangan pengelolaan Parkir <i>On street</i> melalui teknologi parkir meter</p> <p>34. Pengelolaan Parkir <i>Off Street</i> melalui pengembangan <i>Park and Ride</i> didukung <i>smart parking</i></p> <p>35. Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor</p>



Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Interaksi Masyarakat yang Efisien (Community)	S.1. Pembangunan platform dan kanal interaksi sosial Deli Serdang santun dan edukatif.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan ruang terbuka hijau perkotaan, perumahan, perdesaan, dan perusahaan untuk interaksi publik2. Pelaksanaan gerakan interaksi sosial digital sehat melalui <i>content</i> edukatif dan positif dan penambahan <i>hotspot</i> di ruang publik3. Pembentukan tim Hoax Counter yang terintegrasi dengan kanal informasi Media Sosial dan Media Online analitik (Stelsel aktif)4. Kemitraan dengan Kepolisian dalam penegakan <i>cybercrime</i>5. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat di perpustakaan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat6. Pembangunan panggung Pentas Seni di Kawasan Taman Buah Deli Serdang
Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)	S.2. Peningkatan atribusi pelayanan pendidikan yang inklusif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan suprastruktur pendukung pelayanan	<ol style="list-style-type: none">7. Peningkatan minat baca melalui pelaksanaan event atraktif dan pengembangan <i>e-Library</i>8. Pelaksanaan Mesra Bertuah, mewujudkan sekolah ramah anak bersama masyarakat, orang tua dan sekolah

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
	pendidikan.	<p>9. Pengembangan SIM Pintar (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terintegrasi) untuk internal dinas pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Manajemen Operasional (Slonal) untuk pelayanan publik dan pendaftaran sekolah swasta b. SI Mesra Bertuah untuk mendukung program Mesra Bertuah <p>10. Pengembangan dan pembinaan perumusan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)</p> <p>11. Pemenuhan fasilitas pengembangan teknologi informasi di Sekolah</p> <p>12. Pelaksanaan Kembali Bersekolah Anak Kawasan Pesisir, Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba, Anak Penghuni Lembaga Permasyarikatan, Anak Panti Asuhan Mengaji, Anak Kawasan Pesisir Mengaji (Kas Anak Kasir)</p> <p>13. Pelaksanaan Deli Serdang Mewujudkan Impian Sekolah Peduli Keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus (Demi Sepeda Bagus)</p>
Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	S.3. Pembangunan Deli Serdang <i>Crisis Center</i> untuk meningkatkan responsitas didukung kemudahan dan kepastian pelayanan kegawatdaruratan	<p>14. Pembangunan Deli Serdang <i>Crisis Center</i> atau pelayanan kegawatdaruratan yang terintegrasi di sektor kesehatan, perhubungan (kecelakaan), gangguan ketentraman umum, kepolisian, dan kebencanaan</p> <p>15. Penyediaan <i>Early Warning System</i> pada titik-titik rawan bencana</p> <p>16. Optimalisasi penegakan Perda melalui pendekatan Marhusip (Bermartabat, Humanis dan Kreatif)</p>



Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
Program Proteksi Lingkungan (Protection)	En.1. Peningkatan kepastian hukum dan keterbukaan informasi pengelolaan lingkungan hidup guna tata kelola sumber daya air, tanah, dan udara yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten2. Updating Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang terintegrasi dengan Portal Investasi Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i>3. Pengembangan sensor kualitas udara, air, tanah dengan hasil yang terintergrasi dalam Deli Serdang <i>Big Data</i>4. Perumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD)5. Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan secara berkala secara partisipatif<ol style="list-style-type: none">a. Stop BAB (Buang Air Besar) Sembaranganb. Meningkatkan Masyarakat Sadar Lingkungan Melalui Pengelolaan Pertanian Pintar (Mas Darling Papa Pintar)
Tata Kelola Sampah dan Limbah	En.2. Pengelolaan sampah dan limbah berkelanjutan didukung perluasan jangkauan dan kapasitas pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga maupun industri	<ol style="list-style-type: none">6. Peningkatan infrastruktur manajemen pengelolaan pelayanan persampahan<ol style="list-style-type: none">a. Pengembangan Jumpa Madu (Jemput Sampah – Terima Duit)b. Alikasi SIMOGANAS (Sistem Monitoring Pengurangan dan Penanganan Sampah)

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Pengelolaan persampahan dengan pendekatan konversi energi 8. Pemanfaatan sampah terpisah di unit-unit pengelolaan sampah 9. Pengembangan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) 10. Pengelolaan limbah B3 s sesuai ketentuan yang berlaku
Tata Kelola Energy	En.3. Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 11. Pelaksanaan gerakan hemat energi di lingkup perkantoran pemerintah, swasta, sekolah, dan masyarakat 12. Pengadaan penerangan jalan umum hemat energi dan pemanfaatan energi alternatif dalam kawasan permukiman

Peta Jalan Deli Serdang Smart City



Peta jalan pelaksanaan Deli Serdang Smart City merupakan penjabaran secara detail strategi yang dikembangkan menjadi dua tahapan utama yaitu kesiapan dan program kerja (kegiatan prioritas) di 6 (enam) dimensi Smart City. Penjabaran Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penting (output kunci) sebagaimana berikut:

1. Kesiapan Deli Serdang Smart City

a. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan

Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City diprioritaskan sebagaimana berikut:

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Baseline (2018)	Target	Time Line	Leading Sector	Kerjasama	Anggaran
1	Penetapan Regulasi Masterplan Smart City	Regulasi Masterplan Smart City	-	Peraturan Bupati	2018	Dinas Kominfostan	Bappedalitbang, Bag. Hukum	APBD
2	Pembentukan Dewan Smart City Daerah	Keputusan Bupati tentang Dewan Smart City Daerah	-	Surat Keputusan Bupati	2018	Dinas Kominfostan	Bappedalitbang, Bag. Hukum	APBD
3	Pembentukan Tim Pelaksana Smart City	Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Smart City	-	Surat Keputusan Bupati	2018	Dinas Kominfostan	Bappedalitbang, Bag. Hukum	APBD
4	Inisiasi Masterplan dalam Rancangan Teknokratis RPJMD	Muatan Deli Serdang Smart City diakomodasi dalam RPJMD	Perda 1 Tahun 2015	Rancangan Teknokratis RPJMD 2020-2025	2019	Bappedalitbang	Dikominfostan, Setwan	APBD

b. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Deli Serdang Smart City

Rencana pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pelaksanaan Smart City diprioritaskan sebagaimana berikut:

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Baseline (2016)	Target	Time Line	Leading Sector	Kerjasama	Anggaran
1	Pengembangan Jaringan komputer (network) yang terkoneksi internet	Percentase wilayah desa/ kelurahan yang memiliki akses jaringan internet	22 hotspot di masing-masing OPD	100% 22 Kecamatan, 14 Kelurahan dan380 Desa	2018-2020	Dinas Kominfostan	Bappedalitbang	APBD APBDes
2	Pembangunan Network operation Center (NOC) atau Pusat Manajeman Jaringan	Percentase <i>maintenance</i> terhadap performa jaringan	-	100%	2019-2020	Dinas Kominfostan	Bappedalitbang	APBD
3	Pengembangan Data Center	Sertifikasi Data Center	-	Tier II	2019-2025	Dinas Kominfostan	Bappedalitbang	APBD
4	Pembangunan <i>City Operation Center</i> (COC) atau Deli Serdang <i>command center</i>	Jumlah <i>dashboard</i> sistem informasi yang terintegrasi dalam Deli Serdang <i>Command Center</i>	N/a	100%	2025	Dinas Kominfostan	Bappedalitbang	APBD

c. Rencana Pengembangan Aplikasi & Perangkat Lunak Pendukung Deli Serdang Smart City

Rencana Pengembangan Aplikasi & Perangkat Lunak Pendukung Deli Serdang Smart City diprioritaskan sebagaimana berikut:

No	Aplikasi dan Perangkat Lunak	Tahun Pengembangan	Leading Sector	Anggaran
G1	Aplikasi akte kelahiran dan Kematian	2018-2019	Disdukcapil	APBD
G1	Aplikasi proses cek KTP	2018-2019	Disdukcapil	APBD
G1	Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	2020-2025	Disdukcapil	APBD, APBN
G1	<i>Dashboard Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online</i>	2020-2025	Disdukcapil	APBD
G1	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial untuk Verivali BDT dan Pelayanan Sosial	2018-2025	Dinas Sosial	APBD, APBN
G1	Sistem aplikasi bantuan pangan (Situpang)	2018-2025	Dinas Sosial	APBD, APBN
G1	<i>Dashboard Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial</i>	2019-2025	Dinas Sosial	APBD, APBN
G1	Aplikasi e-Pajak dan Retribusi Daerah Daerah	2018-2025	Badan Pendapatan	APBD
G1	<i>Dashboard e-Pajak dan Retribusi Daerah</i>	2020-2025	Badan Pendapatan	APBD
G1	Lacak Deli Serdang	2018-2025	Diskominfostan	APBD
G1	Aplikasi Perizinan Online	2018-2019	Dinas PMPTSP	APBD
G1	SIMPATEN	2018-2019	Setda bag. Tata Pemerintahan	APBD
G1	<i>Online Single Submission (OSS)</i>	2019-2025	Dinas PMPTSP	APBD
G1	<i>Dashboard Online Single Submission (OSS)</i>	2020-2025	Dinas PMPTSP	APBD
G1	Aplikasi E-Padi	2022-2025	Dinas PMPTSP	APBD
G1	Aplikasi Salak Deli	2022-2025	Disdukcapil	APBD

No	Aplikasi dan Perangkat Lunak	Tahun Pengembangan	Leading Sector	Anggaran
G2	<i>e-planning</i> (Perencanaan)	2018-2025	Bappedalitbang	APBD
G2	<i>e-budgeting</i> (Penganggaran)	2018-2025	BKAD	APBD
G2	<i>e-inventory</i> (Pengelolaan Aset berbasis Akrual)	2020-2025	BKAD	APBD
G2	<i>e-procurement</i> (Pengadaan Barang dan Jasa)	2018-2025	LPSE Unit Layanan PBJ	APBD
G2	<i>e-monitoring</i> (Monitoring dan Evaluasi terkait e-planning)	2018-2025	Bappedalitbang, Setda	APBD
G2	e- AKIP (Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mulai dari perencanaan, perjanjian kinerja, pengendalian, hingga pelaporan)	2020-2025	Bappedalitbang, Setda	APBD
G2	Sistem Informasi Kepegawaiian	2018-2025	BKPSDM	APBD
G2	<i>Dashboard Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	2019-2025	Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD
G2	Sistem Informasi Keuangan Desa	2018-2025	DPMDesa	APBD
G2	Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan	2018-2025	DPMDesa	APBD
G2	Pengembangan Website Desa	2018-2025	Pemerintah Desa	APBD
G2	<i>Dashboard Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	2019-2025	Bappedalitbang, Diskomifostan	APBD
G2	Pengembangan portal layanan informasi publik terintegrasi (Deli Serdang <i>Single Window</i>)	2018-2025	Diskominfostan	APBD
G2	Sistem Informasi Deli Serdang <i>Big Data</i>	2021-2025	Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD
G2	<i>Dashboard Deli Serdang Big Data</i>	2021-2025	Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD

No	Aplikasi dan Perangkat Lunak	Tahun Pengembangan	Leading Sector	Anggaran
G2	Sistem Informasi Gerakan Deli Serdang Tertib Arsip (GEDESADARKU)	2019-2025	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD
G2	SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	2018-2025	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD
G2	SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional)	2018-2025	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD
G3	Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)	2019-2025	Setda bag. Hukum	APBD
G3	Aplikasi sosial media analitik	2019-2025	Diskominfostan	APBD
G3	<i>Dashboard</i> sosial media analitik	2019-2025	Diskominfostan	APBD
G3	Pengintegrasian Pusat Pengaduan Deli Serdang (Puspa Deli) dalam Lapor SP4N	2019-2025	Inspektorat, Diskominfostan	APBD
B1	Daporaniyata	2020-2025	Disbudporapar	APBD, APBN
B1	<i>Dashboard</i> Deli Serdang <i>Tourism</i>	2020-2025	Disbudporapar	APBD, APBN
B1	Aplikasi Delipedia	2022-2025	Diskominfostan	APBD
B2	Deli Serdang Mall	2018-2025	Dinas Koperasi dan UKM	APBD, CSR
B2	Portal Investasi Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i>	2020-2025	Dinas PMPTSP, Bappedalitbang	APBD
B2	<i>Dashboard</i> Portal Investasi Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i>	2021-2025	Dinas PMPTSP, Bappedalitbang	APBD
Ec2	Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Melalui Daring	2019-2025	Dinas Ketenagakerjaan	APBD
Ec2	Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK Online)	2019-2025	Dinas Ketenagakerjaan	APBD
Ec2	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri	2019-2025	Dinas Ketenagakerjaan	APBD
Ec3	Sistem Informasi Wirausaha Terpadu Deli Serdang	2018-2025	Dinas Koperasi dan UKM	APBD
Ec3	e-Potensi Desa	2021-2025	DPMDesa	APBD

No	Aplikasi dan Perangkat Lunak	Tahun Pengembangan	Leading Sector	Anggaran
Ec3	Aplikasi Galeri P3UD	2018-2025	Dinas Koperasi dan UKM	APBD
L1	Sistem Informasi e-RTRW	2021-2025	Bappedalitbang, Dinas PMPTSP, Dinas Perkim	APBD
L1	<i>Dashboard e-RTRW</i>	2022-2025	Bappedalitbang, Dinas PMPTSP, Dinas Perkim	APBD
L2	Primary Care BPJS	2018-2025	BJPS Kesehatan	APBN
L2	Aplikasi Pusat Pelayanan Kesehatan	2018	Dinas Kesehatan	APBD
L2	Aplikasi Jamkesmas	2018	Dinas Kesehatan	APBD
L2	Aplikasi Keluarga Sehat	2018-2019	Dinas Kesehatan	APBD, APBN
L2	Aplikasi Komunikasi Data	2018-2019	Dinas Kesehatan	APBD
L2	Aplikasi SIHA	2018-2019	Dinas Kesehatan	APBD, APBN
L2	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Terpadu e-health	2020-2025	Dinas Kesehatan	APBD
L2	<i>Dashboard e-Health</i>	2020-2025	Dinas Kesehatan	APBD
L2	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	2020-2025	RSUD	APBD
L2	<i>Dashboard sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit</i>	2020-2025	RSUD	APBD
L2	Aplikasi <i>Clinical Reminder Sistem</i>	2018-2025	RSUD	APBD
L2	Penerapan Mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri RSUD	2018-2025	RSUD	APBD
L3	e-KIR PKB	2018-2025	Dishub	APBD
L3	ATCS	2018-2025	Dishub	APBD
S2	I-PAKAM	2018-2025	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD
S2	ILIS Lite (sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan)	2018-2025	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD

No	Aplikasi dan Perangkat Lunak	Tahun Pengembangan	Leading Sector	Anggaran
S2	SIM Pintar (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terintegrasi) - Web Pendidikan - SIONAL (Sistem Manajemen Operasional) - SI Mesra Bertuah (Sistem Informasi untuk mendukung inovasi/program Mesra Bertuah)	2018-2025	Dinas Pendidikan	APBD
S3	Pengembangan Sistem Informasi <i>Crisis Center</i>	2021-2025	Kepolisian, Satpol PP, Dishub, Damkar, Dinas Kesehatan, Bappedalitbang	APBD
S3	<i>Dashboard</i> Sistem Informasi <i>Crisis Center</i>	2021-2025	Kepolisian, Satpol PP, Dishub, Damkar, Dinas Kesehatan, Bappedalitbang	APBD
S3	<i>Early Warning Sistem</i>	2019-2025	BPBD	APBD
En1	Pengembangan <i>e-environment</i>	2021-2025	Dinas LH	APBD
En1	<i>Dashboard e-environment</i>	2021-2025	Dinas LH	APBD
En1	Aplikasi Silintong Kuas (Sistem Online Monitoring Kualitas Air Sungai)	2019-2025	Dinas LH	APBD
En2	Pengembangan Jumpa Madu (Jemput Sampah - Terima Duit)	2019-2025	Dinas LH	APBD
En2	Aplikasi SIMOGANAS (Sistem Monitoring Pengurangan dan Penanganan Sampah)	2019	Dinas LH	APBD

d. Rencana Penguatan Literasi Deli Serdang Smart City

Rencana Penguatan Deli Serdang Smart City diprioritaskan sebagaimana berikut:

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Baseline (2018)	Target	Time Line	Leading Sector	Kerjasama	Anggaran
1	Diseminasi Deli Serdang Smart City	Buku perkembangan Deli Serdang Smart City	-	3 buku	2018-2025	Diskominfostan	OPD, Akademisi	APBD
		Jumlah Pelaksanaan Diseminasi secara online dan terbuka	-	24 kali per tahun	2019-2020	Diskominfostan	Bappedalitbang	APBD
2	Inkubasi pengembangan Aplikasi pendukung Smart City	Jumlah perangkat daerah peserta pengembangan	-	31 OPD dan 22 Kecamatan	2019-2021	Diskominfostan	Bappedalitbang Disdukcapil	APBD
		Aplikasi pendukung Smart City	-					
3	Integrasi Deli Serdang Smart City dalam dalam Diklat Pegawai	Jumlah Diklat	-	6 Diklat	2018-2025	BKPSDM	Diskominfostan	APBD
4	Pelatihan SDM di bidang IT	Jumlah Pelatihan Kapasitas		2 pelatihan per tahun	2019-2025	Diskominfostan	Akademisi CSR	APBD

2. Program Kerja (Kegiatan Prioritas)

Smart Governance



Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target							Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
G.1. Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital berbasis ketunggalan identitas	1. Pembentukan tim teknis pengembangan pelayanan publik digital yang terintegrasi	SK Tim		1	1	1	1	1	1	1	Diskominfostan, Bappedalitbang, Setda (orta), Disdukcapil	APBD
											Tim adhoc Seluruh OPD	
	2. Penelaahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen tata laksana pelayanan publik	Persentase Penelaahan Jumlah SOP dibanding Total SOP yang disusun		20-40%	41-60%	61-80%	81-100%	100%	100%	100%	Tim adhoc Seluruh OPD	APBD
											Tim adhoc Seluruh OPD	
	3. Penyusunan inventarisasi form pelayanan publik dan elemen data yang dihasilkan oleh pelayanan publik	Persentase jumlah form yang ditelaah dibanding jumlah form yang disusun		20-40%	41-60%	61-80%	81-100%	100%	100%	100%	Tim adhoc Seluruh OPD	APBD
	4. Pelaksanaan alih media form pelayanan konvensional ke form digital melalui aplikasi GEDESADARKU										Tim adhoc Seluruh OPD	
		Persentase alih media form dibandingkan form yang telah diinventarisir		20-40%	41-60%	61-80%	81-100%	100%	100%	100%	Diskominfostan, Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(l)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
1. Meningkatkan keterwujudan dan pengembangan layanan publik digital di seluruh OPD dan Lembaga Pengguna	5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan sebagai penerima manfaat program pelayanan publik	Jumlah OPD yang melaksanakan MoU pemanfaatan data kependudukan	5 OPD	8 OPD dan 5 Kecamatan	16 OPD dan 10 Kecamatan	22 OPD dan 15 Kecamatan	33 OPD dan 22 Kecamatan	Disdukcapil	APBD				
	6. Penyusunan basis data form dan elemen data pelayanan publik yang diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan	Percentase elemen data yang telah terintegrasi dengan NIK		40-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%	91-100%	Disdukcapil, Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD	
	7. Penyediaan akses <i>web service</i> untuk OPD atau Lembaga Pengguna dalam pemanfaatan data NIK/kependudukan melalui Sistem Data Warehouse (DWH) Dukcapil	Jumlah <i>web service</i> yang disediakan									Diskominfostan, Disdukcapil	APBD	
	8. Perumusan regulasi pendukung pelayanan publik dalam rangka tata laksana pelayanan publik digital	Tahun Perumusan dan Review Regulasi									Setda, Diskominfostan	APBD	
	9. Perumusan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan atau pelayanan OPD	Percentase OPD yang telah merumuskan SOP Pelayanan Publik		61-80%	81-100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappedalitbang, Diskominfostan, Setda	APBD	
	10. Diseminasi dan peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan publik digital	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi online dan konvensional per tahun		24	24	24	24	24	24	24	Diskominfostan	APBD	
		Jumlah Peserta Pelatihan <i>Capacity Building</i>		100	100	100	100	100	100	100	Diskominfostan, BKPSDM	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan pemerintah daerah di era digital	11. Perumusan regulasi pendukung pelayanan publik dalam rangka tata laksana pelayanan khusus perizinan dalam pelaksanaan <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Peraturan Bupati									Dinas PMPTSP	APBD	
	12. Pembangunan infrastruktur pendukung <i>Online Single Submission</i>	Persentase Pengadaan Infrastruktur OSS dibanding kebutuhan		20%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PMPTSP, Bappedalitbang, Setda (ULP)	APBD	
	13. Diseminasi dan peningkatan kapasitas petugas layanan <i>Online Single Submission</i>	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi online dan konvensional per tahun (Pelaku Usaha)		6 kali	6 kali	6 kali	100%	100%	100%	100%	Dinas PMPTSP	APBD	
		Jumlah Peserta <i>Capacity Building OSS</i> Petugas Pelayanan		5	5	5	5	5	5	5	Dinas PMPTSP	APBD	
	14. Pembangunan Mall Pelayanan Publik Deli Serdang	Tahun Pembangunan									Bappedalitbang, Dinas Perkim, Setda, Diskominfostan	APBD, APBN, CSR	
	15. Mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat melalui penempatan ASN Disdukcapil di kantor-kantor Kecamatan melalui TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan)	Tahun pengalihan tugas dan jumlah kecamatan Layanan sudah ada di sebagian kecamatan tapi masih dibelakukan oleh ASN Kecamatan dan bukan oleh ASN Dukcapil		2 Kecamatan	5 Kecamatan	10 Kecamatan	15 Kecamatan	22 Kecamatan			Disdukcapil, BKPSDM, Setda bagian yang membawahi Kecamatan	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(l)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
1. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	16. Pelayanan Siap Antar Dokumen Kependudukan (SADOKU) kepada masyarakat yang membutuhkan seperti warga binaan dan kelompok yang rentan (orang sakit, lansia, difabel, dan disabilitas)	Warga binaan dan kelompok rentan Kabupaten Deli Serdang terlayani untuk Dokumen Kependudukan									Disdukcapil	APBD	
	17. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis ketunggalan identitas												
	a. Aplikasi akte kelahiran dan kematian	Tahun Pengembangan									Disdukcapil	APBD	
	b. Aplikasi proses cek KTP	Tahun Pengembangan									Disdukcapil	APBD	
	c. Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	Tahun Pengembangan									Disdukcapil	APBD, APBN	
	d. Dashboard Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	Tahun Pengembangan									Disdukcapil	APBD	
	e. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKSNG) untuk Verivali BDT dan Pelayanan Sosial	Tahun Pengembangan									Dinas Sosial	APBD, APBN	
	f. Sistem aplikasi bantuan pangan (situpang)	Tahun Pengembangan									Dinas Sosial	APBD,	
	g. Dashboard Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Tahun Pengembangan									Dinas Sosial	APBD, APBN	
	h. Aplikasi e-Pajak dan Retribusi Daerah	Tahun Pengembangan									Badan Pendapatan	APBD	
	i. Dashboard e-Pajak dan Retribusi Daerah	Tahun Pengembangan									Badan Pendapatan	APBD	
	j. Lacak Deli Serdang	Tahun Pengembangan									Diskominfostan	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
G.1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan sistem informasi berbasis data besar (Big Data) untuk mendukung pembangunan Deli Serdang	k. Aplikasi Perizinan Online	Tahun Pengembangan										Dinas PMPTSP	APBD
	l. SIMPATEN	Tahun Pengembangan										Setda (tapem)	APBD
	m. Pelaksanaan <i>Online Single Submission (OSS)</i>	Tahun pengembangan										Dinas PMPTSP	APBD
	n. Pengembangan <i>Dashboard Online Single Submission (OSS)</i>	Tahun pengembangan										Dinas PMPTSP	APBD
	o. Aplikasi Elektronik Pendapatan Asli Daerah Terintegrasi (E-Padi)	Tahun pengembangan										Dinas PMPTSP	APBD
	p. Aplikasi Sarana Layanan Administrasi Kependudukan Deli Serdang (Salak Deli)	Tahun pengembangan										Disdukcapil	APBD
	q. Pelaksanaan Sistem Informasi Bersalin Dapat Akta Kelahiran dan KIA (Silinda Kelana)	Jumlah peserta pertahun										Disdukcapil	APBD
G.2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi dan pengembangan Deli Serdang <i>Big Data</i>	18. Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD dan penetapan RPJMD Deli Serdang 2020-2025	Rancangan Teknokratis	RPJMD 2014-2019									Bappedalitbang	APBD
		Penetapan Perda										Bappedalitbang	APBD
	19. Penyusunan <i>Grand Design</i> Penerapan Norma Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	<i>Grand Design</i> AKIP 1. Hierarkhi Kinerja 2. Bisnis Proses 3. Pengendalian				1	2,3					Bappedalitbang	APBD
	20. Perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan <i>Sustainable Development Goal's (SDG's)</i> 2016-2030	RAD dan Review RAD										Bappedalitbang	APBD
	21. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Roadmap Reformasi Birokrasi										Setda, Bappedalitbang, BKPSDM	APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
	22. Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Persentase OPD yang telah melakukan Anjab		>40%	>75%	100%						Setda	APBD
		Persentase pelaksanaan Evjab		-	60%	100%						Setda	APBD
	23. Penyusunan atau review OPD berbasis urusan penyelenggaraan pemerintahan termutakhir	Peraturan Bupati tentang Organisasi Perangkat Daerah										Setda	APBD
	24. Penyusunan regulasi e-Government terkait pengembangan interoprabilitas sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Peraturan Bupati tentang e-Gov dan SPBE										Diskominfostan	APBD
	25. Penyusunan tim Sistem Informasi Deli Serdang	SK Tim		1	1	1	1	1	1	1		Diskominfostan	APBD
	26. Pelaksanaan integrasi sistem informasi seluruh OPD	Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi (<i>interoperable</i>) dibanding Sisfo yang dikembangkan		10-20%	20-40%	41-60%	61-80%	81-100%	100%	100%		Diskominfostan, Bappedalitbang, Setda	APBD
	27. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah peserta <i>Capacity building</i> per tahun		150	150	150	150	150	150	150		Diskominfostan, BKPSDM	APBD
	28. Pengembangan sistem informasi pemerintahan berbasis interoprabilitas sistem untuk Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			—	—	—	—	—	—	—			
	a. <i>e-planning</i> (Perencanaan)	Tahun pengembangan										Bappedalitbang	APBD
	b. <i>e-budgeting</i> (Penganggaran)	Tahun pengembangan										BKAD	APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
a. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	c. <i>e-inventory</i> (Pengelolaan Aset berbasis Akrual)	Tahun pengembangan										BKAD	APBD
	d. <i>e-procurement</i> (Pengadaan Barang dan Jasa)	Tahun pengembangan										LPSE Unit Layanan PBJ	APBD
	e. <i>e-monitoring</i> (Monitoring dan Evaluasi)	Tahun pengembangan										Bappedalitbang, Setda	APBD
	f. e- AKIP (Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mulai dari perencanaan, perjanjian kinerja, pengendalian, hingga pelaporan)	Tahun pengembangan										Bappedalitbang, Setda	APBD
	g. Sistem Informasi Kepegawaian	Tahun pengembangan										BKPSDM	APBD
	h. Dashboard Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tahun pengembangan										Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD
	Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
	i. Sistem Informasi Keuangan Desa	Tahun pengembangan										DPMDesa	APBD
	j. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa melalui INTIF Desa	Tahun pengembangan										DPMDesa	APBD
	k. Kasi-Kasi Uang (Aplikasi Verifikasi Dokumentasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Tahun pengembangan										DPMDesa	APBD
	l. Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan	Tahun pengembangan										DPMDesa	APBD
	m. Pengembangan Website Desa	Tahun pengembangan		51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%	100%	100%		Diskominfostan	APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target							Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
n.	Dashboard Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun pengembangan									Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD
29.	Pengembangan portal layanan informasi publik terintegrasi (Deli Serdang <i>Live Center</i>)	Pengembangan http://www.deliserdangkab.go.id/	2017								Diskominfostan	APBD
30.	Pelaksanaan inventarisasi elemen data pembangunan daerah dan integrasi elemen data pembangunan dan pelayanan publik digital	Inventarisasi Elemen Data 1. BDT 2. SIPD 3. IKU-IKD 4. SDG's 5. Survey Based 6. Report Based		1,2, 3	4	5	6				Bappedalitbang, Diskominfostan, Setda	APBD
31.	Perumusan Glosarium elemen data pembangunan daerah	Elemen data yang telah dibakukan			1,2, 3	4	5	6			Bappedalitbang, Diskominfostan, Setda	APBD
32.	Perumusan <i>Grand Design</i> pengembangan Deli Serdang <i>Big Data</i>	<i>Grand Design</i> Deli Serdang <i>Big Data</i>									Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD
33.	Perumusan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan pengolahan data OPD	SOP OPD pengolahan data		71-80%	81-90%	91-100%	100%	100%	100%	100%	Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD
34.	Penyusunan sistem informasi dan <i>dashboard</i> Deli Serdang <i>Big Data</i>	Sistem Informasi Deli Serdang <i>Big Data</i>									Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD
		<i>dashboard</i> Deli Serdang <i>Big Data</i>									Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(l)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
G.3. Peningkatan kualitas kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah	35. Integrasi <i>Dashboard</i> Sistem Informasi terhadap Deli Serdang <i>Live Center</i>	Persentase <i>Dashboard</i> Sistem Informasi yang diakomodasi dalam Deli Serdang <i>Command Center</i>			41-60%	61-80%	81-100%	100%	100%	100%	Bappedalitbang, Diskominfostan	APBD	
	36. Peningkatan infrastruktur IT (<i>back office</i>) Kecamatan	Rasio Pegawai dan perangkat IT 1:8		1:7	1:6	1:5	1:4	1:3	1:2	1:1	Kecamatan	APBD	
	37. Peningkatan SDM kecamatan dalam pemanfaatan IT	Jumlah Peserta pelatihan		44	44	44	44	44	44	44	Kecamatan, Diskominfostan	APBD	
G.3. Peningkatan kualitas kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah	38. Pengalihmediaan dokumen atau regulasi daerah yang tidak dikecualikan	Persentase Alih Media Regulasi Daerah pada tahun ke-n		>30%	>60%	>80%	100%	100%	100%	100%	Setda	APBD	
	39. Penyusunan Sistem Informasi Deli Serdang Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) didukung tracking sistem	Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)									Setda	APBD	
	40. Publikasi dokumen pembangunan dan produk hukum daerah dalam rangka <i>Open Government Partnership</i>	Jumlah Publikasi data pembangunan			200	200	200	200	200	200	Setda, Diskominfos tan	APBD	
		Persentase Publikasi Regulasi dibanding yang dialihmediakan			>60%	>80%	100%	100%	100%	100%	Setda	APBD	
	41. Pengembangan sistem informasi Media Sosial dan Media Online analitik (Stelsel aktif)	Aplikasi sosial media analitik									Diskominfostan	APBD	
		<i>Dashboard</i> social media analitik									Diskominfostan	APBD	
	42. Pengembangan Puspadeli yang terintegrasi ke dalam Lapor SP4N	Tahun pengintegrasian Pusat Pengaduan Deli Serdang (Puspa Deli) dalam Lapor SP4N									Inspektorat, Diskominfostan	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
	43. Publikasi produk hukum melalui forum konsultasi public	Persentase Forum dibandingkan jumlah perda			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setwan	APBD
	44. Perbaikan pengelolaan administrasi kearsipan	Persentase pendataan arsip daerah		>20%	<25%	>40%	>60%	>75%	>80%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
	a. SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	Tahun Pelaksanaan									Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
	b. SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional)	Tahun Pelaksanaan									Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
	45. Pembangunan data base informasi kearsipan melalui Aplikasi "Gerakan Deli Serdang Tertib Arsip (GEDESADARKU) off line app	Persentase OPD pelaksana GEDESADARKU		60% ^	75% ^	>80%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
		Pengembangan Sistem Informasi Website Gedesadarku									Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
		Integrasi GEDESADARKU, SIKD, dan SIKN									Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	



Smart Branding

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(l)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
B.1. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dengan tagline "Mempesona"	1. Penyusunan atau Review Rencana Induk Pariwisata Daerah dan Rencana Pengembangan Pariwisata Desa. <ul style="list-style-type: none"> - Idenifikasi objek wisata tersembunyi - Penyediaan infrastruktur - Pelatihan masyarakat untuk mendukung kepariwisataan 	Riparda/ Review Riparda									Bappedalitbang, Disbudporapar	APBD	
		Jumlah Desa dengan Destinasi Wisata yang memiliki Ripardes/ Review Ripardes	3 desa/ 380 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	Disbudporapar	APBD, APBDesa	
	2. Pelaksanaan kemitraan pengembangan kapasitas terhadap pelaku usaha di lokasi wisata	Jumlah peserta pelatihan per tahun		300	300	300	300	300	300	300	Disbudporapar	APBD, APBN, CSR	
	3. Pembangunan Infrastruktur pendukung Destinasi Wisata	Percentase pemenuhan infrastruktur pendukung destinasi wisata dibandingkan kebutuhan		>2-3 %	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%	Disbudporapar, Dinas Perkim, DINAS PU, Bappedalitbang	APBD, APBN, CSR	
	4. Pengembangan destinasi wisata Kenang Lemu (Kenali Deli Serdang Lewat Museum)	Pertumbuhan peningkatan kunjungan museum		>2-4%	>3-5%	>3-5%	>3-6%	>4-7%	>4-7%	>4-7%	Disbudporapar	APBD, APBN, CSR	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
	5. Pengembangan destinasi wisata tematik berbasis komunitas Desa dan kawasan bisnis → pengembangan Si DEWI yang Mempesona (Potensi Desa Wisata yang Mempesona)	Jumlah Desa Wisata berbasis komunitas Desa dan kawasan bisnis	3 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	Disbudporapar	APBD, APBN, CSR	
	6. Pembangunan infrastruktur Skate Park di lingkungan Taman Buah Deli Serdang	Jumlah pengguna Skate Park yang terus meningkat									Dinas Perkim	APBD	
	7. Pengembangan Aplikasi Daporaniyata: Aplikasi yang merupakan database untuk mendukung kegiatan di Disbudporapar	Kemudahan akses data terkait Disbudporapar Kecepatan akses data Kevalidan data Disbudporapar	Sudah ada								Disbudporapar	APBD	
	8. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan <i>Deli Serdang Tourism</i> dengan prioritas <i>content</i> informasi destinasi wisata, konektivitas, akomodasi, kuliner dan <i>calendar event</i>	Sistem informasi Deli Serdang <i>Tourism</i>									Disbudporapar, Diskominfostan	APBD, APBN	
		<i>Dashboard Deli Serdang Tourism</i>									Disbudporapar, Diskominfostan	APBD, APBN	
	9. Aplikasi Delipedia	Tahun Pengembangan									Dinas Kominfostan	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
B.2. Peningkatan Deli Serdang <i>easy of doing business</i> serta ekosistem bisnis daerah yang atraktif, interaktif, dan informatif melalui pengembangan platform <i>Business and Investment Lounge</i>	10. Pelaksanaan Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i> atau pertemuan kepala daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat	Jumlah pertemuan Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i> per tahun		6 kali	Dinas PMPTSP, Bappedalitbang, Setda	APBD, CSR							
		Jumlah Kegiatan Eksibisi dan promosi produk lokal per tahun		12 kali	Dinas Koperasi dan UKM	APBD, CSR							
	11. Pembangunan dan pemanfaatan Ruang publik sebagai Ruang Eksibisi, promosi produk lokal, dan <i>co-working space</i>	Jumlah <i>co-working space</i>		1	1	1	2	2	2	2	Dinas PMPTSP, Diskominfostan	APBD, CSR	
		Pengembangan Aplikasi Deli Serdang Mall berbasis <i>mobile</i>									Dinas Koperasi dan UKM, Diskominfostan	APBD, CSR	
		Sinkronisasi updating Data Base Investasi secara spasial		>30%	41-60%	61-80%	81-100%	100%	100%	100%	Dinas PMPTSP, Bappedalitbang	APBD	
	13. Pembangunan Portal Investasi Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i>	Portal Investasi Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i>									Dinas PMPTSP, Bappedalitbang	APBD	
		Dashboard Portal Investasi Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i>									Dinas PMPTSP, Bappedalitbang	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
B.3. Pembangunan Landmark Kota Deli kawasan aerotropolis, pusat bisnis, dan Kawasan Industri <i>hinterland</i> Medan Raya	14. Pembangunan Landmark Deli Serdang berbasis kawasan industri	Tahun Pembangunan Landmark									Dinas SDABMBK, Dinas Cikataru	APBD, APBN, CSR	
	15. Pembangunan Landmark Deli Serdang berbasis kawasan aerotropolis, pusat bisnis	Tahun Pembangunan Landmark									Dinas SDABMBK, Dinas Cikataru	APBD, APBN, CSR	
	16. Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Tahun Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Hias Air Tawar									Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD	
	17. Pelaksanaan pemetaan batas wilayah melalui toponomi berbasis <i>Geographic Information System (GIS)</i>	Persentase toponomi berbasis GIS	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%	100%	100%	100%	Dinas Cikataru, Setda, DPMDesa	APBD	
	18. Restorasi dan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya	Persentase pelestarian cagar budaya (identifikasi dan restorasi fisik)	50-60%	61-70%	71-90%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas SDABMBK, Dinas Cikataru, Disbudporapar	APBD, CSR	



Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
Ec.1. Pengembangan Kawasan Industri didukung peningkatan kemantapan infrastruktur dan koneksiitas daerah melalui kawasan aerotropolis Kualanamu	1. Perumusan dan/atau review masterplan jalan dan penetapan status jalan	Masterplan atau review masterplan jalan									Bapppeda	APBD	
		Penetapan/ review Status Jalan									Bapppeda	APBD	
	2. Peningkatan Kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan poros Desa, Jalan Desa.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	29,84%		38%	45%					Dinas SDABMBK	APBD, CSR	
		Persentase Jalan Poros Desa dalam Kondisi Baik			55%	65%	75%	85%	90%		Dinas SDABMBK dan Pemdes	APBD. APBDes a,CSR	
	3. Pembangunan Kawasan Industri	Jumlah Kawasan Industri	6	6	6	6	7	7	8		Dinas PMPTSP, Bappedalitbang	APBD, APBN, CSR	
	4. Pemenuhan kebutuhan air baku industri dan tenaga listrik kawasan industri terintegrasi	Kapasitas Air Baku (liter per detik)	<150-200	200	225	250	275	300	325		Dinas Cikataru, PDAM	APBD, APBN	
		Kapasitas Listrik (MW)	3000	>3000	>3000	>3500	>3500	>3500	>3500		PLN	APBD, APBN	
	5. Penaataan utilitas jaringan telekomunikasi	Persentase penataan panjang jaringan komunikasi		51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%	100%	100%	Diskominfostan	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
Ec.2. Pengembangan nilai tambah kawasan industri didukung peningkatan peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing	6. Pelatihan ketenagakerjaan berbasis <i>demand driven</i> atau kebutuhan dunia usaha dan berbasis kewirasahaan	Jumlah Peserta pelatihan		75	75	75	75	75	75	75	Dinas Ketenagakerjaan	APBD, APBN, CSR	
	7. Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	Tahun Pengembangan									Dinas Ketenagakerjaan	APBD, APBN, CSR	
	a. Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Melalui Daring	Tahun Pengembangan									Dinas Ketenagakerjaan	APBD, APBN, CSR	
	b. Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK Online)	Tahun Pengembangan									Dinas Ketenagakerjaan	APBD, APBN, CSR	
	c. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri	Tahun Pengembangan									Dinas Ketenagakerjaan	APBD, APBN, CSR	
	d. Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan	Tahun Pengembangan									Dinas Ketenagakerjaan	APBD	
Ec.3. Penguatan kapasitas usaha mikro, ekonomi lokal, serta pengentasan kemiskinan bersasaran	8. Pendampingan pengembang pelaku usaha <i>start up</i> dan usaha mikro melalui inkubasi bisnis	Jumlah Usaha peserta Inkubasi Bisnis per tahun		25	25	25	30	30	30	30	Dinas Koperasi dan UKM	APBD, CSR	
	9. Pembangunan Sistem Informasi Wirausaha Terpadu Deli Serdang	Tahun Pengembangan									Dinas Koperasi dan UKM	APBD	
	10. Pengembangan sub-terminal agrobisnis	Jumlah STA per Kecamatan per tahun		1	2	3	4	5	6	7	Dinas Pertanian	APBD	
	11. Pemberian hibah bersaing untuk inovasi berbasis kewirausahaan atau usaha produktif	Jumlah Usaha penerima hibah per tahun		25	25	25	30	30	30	30	Dinas Koperasi dan UKM	APBD, APBNCSR	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
	12. Perluasan akses pembiayaan UKM terhadap perbankan	Persentase UKM yang mengakses pembiayaan perbankan		25-35%	30-40%	35-45%	40-50%	45-55%	55-60%	60-65%	Perbankan, Dinas Koperasi dan UKM	APBD, CSR, APBN	
	13. Pengembangan aplikasi IUMK DS Melalui Online (Ijin Usaha Mikro Kecil Deli Serdang) Melalui Online → aplikasi untuk membantu pengusaha mikro kecil mengajukan ijin secara online	Jumlah ijin yang diajukan dan disetujui secara online									Dinas Koperasi dan UKM	APBD	
	14. Penelaahan kembali dan perumusan regulasi teknis pengelolaan ekonomi lokal perdesaan melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau BUMADes (Badan Usaha Milik Antar Desa);	Lembar Kerja Evaluasi									DPMDesa	APBD	
	15. Pemetaan potensi pedesaan dan kawasan perdesaan dalam rangka pemetaan segmen bisnis ekonomi lokal desa	Persentase Pemetaan Potensi Desa		45-50%	50-55%	50-60%	60-70%	70-80%	80-90%	90-100%	DPMDesa	APBD	
	16. Pembentukan BUMDesa dan BUMADesa	Jumlah BUMDesa (380 Desa)		>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	DPMDesa	APBD, APBDes, CSR	
		Jumlah BUMADesa (22 Kecamatan)		1	2	4	8	14	18	22	DPMDesa	APBD, APBDes, CSR	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
	17. Pelatihan, pendampingan, dan monitoring dalam pengembangan kegiatan usaha BUMDesa dan BUMADesa	Persentase BUMDesa dan BUMADesa sehat dibanding unit yang terbentuk		60-70%	70-80%	80-90%	90-100%	100%	100%	100%	DPMDesa	APBD, APBDes, CSR	
	18. Pengembangan sistem informasi potensi perdesaan yang terintegrasi dengan portal peta Investasi Daerah	Pengembangan e-Potensi Desa									DPMDesa	APBD	
	19. Pelaksanaan verivali BDT (Basis Data Terpadu) Kemiskinan yang terintegrasi dengan Deli Serdang Big Data	Persentase Data BDT yang diverifikasi per tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos	APBD	
	20. Perumusan masterplan program unggulan pengentasan kemiskinan berbasis <i>pro poor planning, budgeting, and monitoring</i>	Masterplan P3BM									Dinsos	APBD	
	21. Pemberdayaan kelompok marginal intervensi program unggulan pengentasan kemiskinan bersasaran	Penurun Tingkat Kemiskinan	4,62%	<4,5%	<4,00%	<3,50%	<3,00%	<2,5%	<2,00%	<1,50%	Bappedalitbang, Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMDes	APBD, APBN, APBDprov, APBdesa, CSR	
	22. Penurunan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni		<35%	<30%	<25%	<20%	<15%	<10%	<5%	Dinas Perkim	APBD, APBN, APBDprov	
	23. Penurunan Kawasan Kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh (per tahun)		5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	Dinas Perkim	APBD, APBN, APBDprov	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
Ec.3. Pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan pertanian dan pariwisata	24. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian dan perkebunan	Percentase pemenuhan infrastruktur Hutbun dibandingkan kebutuhan			25-30%	30-35%	35-40%	40-45%	45-50%	50-55%	55-60%	Dinas Pertanian	APBD, APBDesa, CSR
	25. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Luas Lahan Alih Fungsi LP2B		0 ha	Dinas Pertanian, Bappedalitbang	APBD							
	26. Pengembangan Kampung Organik	Jumlah Piloting Kampung Organik		2	2	2	3	3	4	4	Dinas Pertanian	APBD	
	27. Pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	Jumlah komoditas yang dijual di TTIC		2	2	3	3	4	5	6	Dinas Ketahanan Pangan	APBD	
	28. Aplikasi Galeri P3UD	Tahun Pengembangan									Disperindag	APBD	
	29. Sentra Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terintegrasi (SETANGKAI PADI)	Percentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		0-5%	5-10%	5-15%	15-20%	20-25%	25-30%	30-35%	Badan Pendapatan Daerah, Bappedalitbang	APBD	
	30. Petani Muda Andalan Sebagai Inkubator Pertanian Milenial (Pemuda Kaperle)	Jumlah Peserta		500	800	1000	1500	2000	3000	4000	Dinas Pertanian, Masyarakat	APBD, CSR	
Ec.4. Pengembangan platform e-commerce dan transaksi pemerintahan dengan mekanisme elektronifikasi	30. Pelatihan terhadap pelaku usaha dalam penerapan transaksi digital	Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih per tahun		300	300	300	300	300	300	300	Dinas Koperasi dan UKM, Diskominfostan	APBD	
	31. Elektronifikasi transaksi pemerintahan berbasis non tunai	OPD yang melaksanakan transaksi non tunai		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setda, Inspektorat	APBD	
	32. Penerapan e-retribusi di pasar	Tahun pengembangan/penerapan									Dinas Perindustrian Perdagangan, Perbankan	APBD, CSR	



Smart Living

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target							Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
L.1. Pembangunan keselarasan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota layak huni dan berdaya saing	1. Penyusunan dan/atau review Rencana Tata Ruang Wilayah	Penyusunan dan/atau review RTRW									Bappedalitbang	APBD
	2. Penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Penyusunan RDTR									Bappedalitbang	APBD
	3. Perumusan regulasi insentif dan disincentif pemanfaatan ruang	Peraturan Bupati									Bappedalitbang, Dinas Cikataru, BKAD, Setda	APBD
	4. Smart Sistem Management Pengelolaan Jalan dan Drainase	Terwujudnya peta jalan dan drainase di wilayah Kab. Deli Serdang									DINAS Cikataru, Dinas SDABMBK	APBD
	5. Pengembangan Sistem Informasi pengendalian tata ruang berbasis <i>Geographic Information System</i> (GIS) yang terintegrasi dengan Portal Deli Serdang <i>Business and Investment Lounge</i>	Sinkronisasi Basi Data tata ruang berbasis GIS		30-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%	Bappedalitbang litbang, Dinas PMPTSP,Dinas Cikataru	APBD
		Sistem Informasi e-RTRW									Bappedalitbang, Dinas PMPTSP, Dinas Cikataru	APBD
		Dashboard e-RTRW									Bappeda, Dinas PMPTSP,Dinas Cikataru	APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
L.2. Peningkatan atribusi pelayanan kesehatan secara inklusif promotif, preventif, maupun preventif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan suprastruktur pendukung pelayanan kesehatan	6. Perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) akselerasi Zero AKI-AKB	RAD Program peningkatan keselamatan ibu									Dinas Kesehatan	APBD	
		Persentase Balita yang mendapatkan ASI Ekslusif	47,9%	49%	51%	53%	55%	57%	59%	61%	Dinas Kesehatan	APBDesa, APBD, CSR	
		Kampung KB	2017 22 Kec 24 Desa 2018 9 Kec 21 desa	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	Dinas PPKBP3A	APBD, APBN	
	8. Pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat didukung PKK, UKS, dan organisasi kemasyarakatan.	Ruang Pojok ASI di tiap Kantor Pemerintahan, Ruang Publik, Fasilitas Kesehatan	<60%	>75%	>85%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	APBD, APBN, Swadaya	
		Desa berbasis STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	80%	80-84%	84-88%	88-92%	92-96%	96-100%			Dinas Kesehatan, Pemdes, DPKP, PDAM	APBD, APBN, Swadaya	
	9. Pembangunan aplikasi mobile SIAGA GENRE (Sistem Informasi Anak dan Gender Generasi Berencana) sebagai kanal distribusi informasi mengenai anak dan gender kepada masyarakat	Tahun pembangunan									Dinas PPKBP3A, Diskominfostan	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
	10. Revitalisasi pengendalian penduduk melalui KB untuk menurunkan <i>Total Fertility Rate</i> (TRF) dan meningkatkan kepesertaan KB	Persentase Kepesertaan KB dibanding PUS	71,25%	65-70%	65-70%	65-70%	65-70%	65-70%	65-70%	65-70%	Dinas PPKBP3A	APBD, APBN	
	11. Perluasan akses air minum melalui jaringan PDAM dan akses air bersih non PDAM.	Persentase Akses Air Bersih		>72%	>78%	>83%	>88%	>95%	100%	100%	Dinas Cikataru, PDAM	APBD, APBN, CSR	
	12. Optimalisasi sarana olahraga, pusat kesenian, budaya, serta ruang terbuka hijau di wilayah permukiman sebagai pusat kesehatan promotif dan preventif	Jumlah pelaksanaan kegiatan promotif per tahun (puskesmas dan wilayah kerja)		52 kali	Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan	APBD, APBN							
	13. Pembangunan pusat pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan dan desa	Persentase Posyandu Mandiri Pratama (36) Madya (558) Purnama (735) Mandiri (28)	2,06%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	Dinas Kesehatan, Pemdes	APBD, APBdesa	
		Jumlah Pustu	110	112	114	116	118	120	122	124	Dinas Kesehatan, Pemdes	APBD, APBdesa	
	14. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Peserta	45	50	50	60	60	70	70	80	Dinas P2KBP3A	APBD, APBdesa	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan perlindungan sosial	15. Penanganan aduan korban kekerasan perempuan dan anak melalui P2TTP2A	Persentase penanganan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P2KBP3A	APBD, APBdesa	
		Desa percontohan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)			>2	>4	>6	>8	>10	>12	>14	Dinas P2KBP3A	APBD, APBdesa
	16. Inisiasi Desa Layak Anak	Jumlah Desa Layak Anak (per tahun)	22	>15-20	>15-20	>15-20	>15-20	>15-20	>15-20	>15-20	Dinas P2KBP3A	APBD, APBdesa	
	17. Akreditasi puskesmas	Jumlah puskesmas terakreditasi	32 dari 34	34	34	34	34	34	34	34	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	
		Jumlah puskesmas dengan status BLUD	20 dari 34	34	34	34	34	34	34	34	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	
	18. Pemenuhan rasio tenaga kesehatan melalui mekanisme formasi kepegawaian khusus dan pengembangan karir	Jumlah Dokter Umum	711	720	730	740	750	760	770	780	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	
		Jumlah Ahli Gizi	80	90	100	110	120	120	140	150	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	
		Jumlah Dokter Spesialis	299	310	320	330	340	350	360	370	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	
		Jumlah Dokter Gigi	105	115	125	135	145	155	165	175	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	
		Jumlah Bidan	1425	1435	1445	1455	1465	1475	1485	1495	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	
		Jumlah Perawat	1361	1370	1380	1390	1400	1410	1410	1420	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
	19. Pelayanan terpadu penanganan kesehatan ibu hamil resiko tinggi (pemeriksaan penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan nifas)	Jumlah Kematian Ibu	19	<18	<16	<12	<8	<6	<4	0	Dinas Kesehatan	APBDes, APBD, APBDProv, APBN,CSR	
		Jumlah Kematian Bayi	91	<85	<75	<65	<55	<45	<35	<25	Dinas Kesehatan		
	20. Pengembangan aplikasi berbasis mobile PIL KB MESRA (Pusat Informasi Pelayanan KB Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)	- Terbangunnya aplikasi mobile yang merupakan pusat informasi layanan (PIL KB MESRA) di tahun 2020 - Meningkatnya pencapaian peserta KB baru - Meningkatnya partisipasi pria dalam program KB									Dinas P2KBP3A, Diskominfostan	APBD	
	21. Workshop Penanganan Komplikasi Neonatus bagi Dokter, Bidan, dan Perawat	Jumlah peserta workshop (per tahun)		>50		65%/30%	70%/32.5%	75%/35%	80%/37.5%				
	22. Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sadar Gizi	Jumlah Keluarga yang dibina (per tahun)		>60	>70	>75	>80	>100	>120	>150	>200	Dinas Kesehatan	APBD, APBDes
	23. Pemberian Makanan Tambahan untuk Penderita Gizi Buruk	Persentase Pemenuhan Makanan dan Vitamin tambahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	APBD, APBDes

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan kesehatan berbasis data.	24. Pemenuhan universal coverage Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBD, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok marginal lainnya	Cakupan JKN PBI APBD, PBI APBN, dan Mandiri	547.424 PBI JKN	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	100%	Dinas Kesehatan,BPJS Ketenagakerjaan, Disdukcapil	APBD, APBN, Swadaya	
	25. Pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis ketunggalan identitas mencakup informasi pelayanan kesehatan, alat kesehatan, kesediaan obat, peta fasilitas kesehatan, hotline kegawatdaruratan, hasil monitoring terhadap produk makanan dan minuman, serta data riset kesehatan dasar												
	a. PrimaryCare BPJS	Tahun pengembangan									BJPS Kesehatan	APBN	
	b. Aplikasi SIKDA	Tahun pengembangan									Dinas Kesehatan	APBD, APBN,	
	c. Aplikasi Keluarga Sehat	Tahun pengembangan									Dinas Kesehatan	APBD, APBN,	
	d. Aplikasi Komunikasi Data	Tahun pengembangan									Dinas Kesehatan	APBD, APBN,	
	e. Aplikasi SIHA (sistem Informasi HIV AIDS)	Tahun pengembangan									Dinas Kesehatan	APBD, APBN,	
	f. Aplikasi Satu Data Kesehatan (Dashboard Pelaporan)	Tahun pengembangan									Dinas Kesehatan	APBD	
	g. Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan e-de sehat	Tahun pengembangan									Dinas Kesehatan	APBD	
	h. Dashboard Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan e-de sehat	Tahun pengembangan									Dinas Kesehatan	APBD,	
	i. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Tahun pengembangan									RSUD	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
L.3. Penguatan konektivitas daerah yang ramah lingkungan didukung pengembangan <i>smart mobility</i> penduduk dan sistem logistik daerah	j. Dashboard sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Tahun pengembangan										RSUD	APBD
	k. Aplikasi Clinical Reminder Sistem.	Tahun pengembangan										RSUD	APBD
	l. Penerapan Mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri RSUD	Tahun pengembangan										RSUD	APBD
	26. Pelayanan pendistribusian obat melalui pemanfaatan sistem informasi pendistribusian obat pasien (SIPOP).	Jumlah peserta yang didistribusikan obat							50	70	100	RSUD	APBD
L.3. Penguatan konektivitas daerah yang ramah lingkungan didukung pengembangan <i>smart mobility</i> penduduk dan sistem logistik daerah	27. Pelaksanaan transportasi massal dalam mendukung integrasi kawasan aerotropolis Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung	Ketersediaan Transportasi Massal pendukung kawasan aerotropolis (<i>mass rapid transport</i>)							1	1	1	Dinas Perhubungan	APBD, APBN
	28. Pemberdayaan angkutan pedesaan	Persentase keterjangkauan angkutan perdesaan dibanding jumlah desa			>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	Dinas Perhubungan	APBD, APBN
	29. Pembayaran Bus <i>Cashless</i>	Pengembangan sistem transaksi bus cashless										Dinas Perhubungan	APBD, APBN
	30. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung konektivitas daerah ramah lingkungan dan gender	Persentase Transportasi Ramah			>60%	>65%	>70%	>75%	>80%	>85%	>90%	Dinas Perhubungan	APBD
		Persentase Halte Ramah			>70%	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	100%	Dinas Perhubungan	APBD
		Persentase Terminal, Bandara, Stasiun Ramah			>80%	>85%	>90%	>95%	>100%	>100%	100%	Dinas Perhubungan	APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
31. Peningkatan kelancaran mobilitas penduduk melalui pengembangan <i>Automatic Traffic Control System</i> (ATCS) di titik kerawanan	Jumlah Penerapan ATCS atau Smart Traffic Light			2 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	8 Lokasi	Dinas Perhubungan	APBD	
	Dashboard ATCS			<600	<550	<550					Dinas Perhubungan	APBD	
	Jumlah Penurunan Kecelakaan		634				<500	<450	<400	<350	Dinas Perhubungan	APBD	
32. Pemetaan potensi parkir Parkir <i>On Street</i> dan <i>Off Street</i>	Pemetaan Potensi										Dinas Perhubungan	APBD	
33. Pembentukan Tim Yustisi penertiban Parkir Liar dan pengembangan pengelolaan Parkir <i>On street</i> melalui teknologi parkir meter	Surat Keputusan		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	APBD	
	Pengembangan Parkir Meter			5	10	18	26	34	42	50	Dinas Perhubungan	APBD	
34. Pengelolaan Parkir <i>Off Street</i> melalui pengembangan <i>Park and Ride</i> didukung <i>smart parking</i>	Pengembangan e-Parking										Badan Pendapatan	APBD	
	Dashboard e-Parking										Badan Pendapatan	APBD	
35. Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan e-KIR PKB										Dinas Perhubungan	APBD	



Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
S.1. Pembangunan platform dan kanal interaksi sosial Deli Serdang santun dan edukatif.	1. Pemenuhan ruang terbuka hijau perkotaan, perumahan, perdesaan, dan perusahaan untuk interaksi publik	Persentase RTH dibanding luas wilayah		>10%	>12%	>14%	>16%	>18%	20%	>20%	Dinas LH, Dinas Cikataru	APBD	
	2. Pelaksanaan gerakan interaksi sosial digital sehat melalui <i>content</i> edukatif dan positif dan penambahan <i>hotspot</i> di ruang public	Jumlah Komunitas gerakan interaksi sosial digital sehat		10	20	25	30	35	40	45	Diskominfostan, Komunitas	APBD, CSR, Swadaya	
		Jumlah Hotspot di ruang public	3	8	12	20	28	36	44	56	Diskominfostan	APBD, CSR, Swadaya	
	3. Pembentukan tim Hoax Counter yang terintegrasi dengan kanal informasi Media Sosial dan Media Online analitik (Stsel aktif)	Surat Keputusan		1	1	1	1	1	1	1	Diskominfostan	APBD	
	4. Kemitraan dengan Kepolisian dalam penegakan <i>Cybercrime</i>	Penindakan <i>Cybercrime</i>		>70%	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	100%	Kepolisian	APBD, APBN	
	5. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat di perpustakaan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan	30	50	75	100	125	150	175	200	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
	6. Pembangunan panggung Pentas Seni di Kawasan Taman Buah Deli Serdang	Jumlah pertunjukan seni yang dilakukan			2	3	3	4	4	4	Dinas CIKATARU	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
S.2. Peningkatan atribusi pelayanan pendidikan yang inklusif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan suprastruktur pendukung pelayanan Pendidikan	7. Peningkatan minat baca melalui pelaksanaan event atraktif dan pengembangan e-Library	Pelaksanaan acara gemar membaca per tahun		12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD, APBN, CSR, Swadaya	
		Penambahan Jumlah Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah (per tahun)		>50 Judul	>50 Judul	>50 Judul	>50 Judul	>50 Judul	>50 Judul	>50 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
		Pengembangan e-Library melalui sistem informasi I-Pakam									Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
		Integrasi antara I-Pakam dan INLIS Lite, INLIS Lite (Integrated Library Sistem)									Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
		Dashboard I-Pakam									Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD	
	8. Pelaksanaan Mesra Bertuah Mewujudkan sekolah ramah anak bersama masyarakat, orang tua dan sekolah	Sekolah yang menerapkan Model pembelajaran pakem (aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) dan Outdoor classroom (per tahun)	2014	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	Dinas Pendidikan	APBD	
		Sekolah Adiwiyata (per tahun)		5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	Dinas Pendidikan	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
9. Pengembangan SIM Pintar (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terintegrasi) untuk internal dinas Pendidikan:		Sekolah ramah anak (per tahun)		5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	Dinas Pendidikan	APBD	
		UKS (per tahun)		5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	Dinas Pendidikan	APBD	
		Kelas Parenting untuk paguyuban orang tua siswa (per tahun)		5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	Dinas Pendidikan	APBD	
	a. Sistem Manejemen Operasional (SIONAL) untuk pelayanan publik dan pendaftaran sekolah swasta	Pengembangan SIMPintar									Dinas Pendidikan	APBD	
		Dashboard SIMPINTAR									Dinas Pendidikan	APBD	
		Pengembangan SIONAL									Dinas Pendidikan	APBD	
		Dashboard SIONAL									Dinas Pendidikan	APBD	
		Pengembangan SI Mesra Bertuah									Dinas Pendidikan	APBD	
	b. SI Mesra Bertuah untuk mendukung program Mesra Bertuah	Dashboard SI Mesra Bertuah									Dinas Pendidikan	APBD	
		Persentase Sekolah yang menyusun RKAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	APBD	
	10. Pengembangan dan pembinaan perumusan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)	Pengembangan sistem informasi perencanaan dan pelaporan sekolah									Dinas Pendidikan	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
		Dashboard sistem informasi perencanaan dan pelaporan sekolah										Dinas Pendidikan	APBD
	11. Pemenuhan fasilitas pengembangan teknologi informasi di Sekolah	Percentase Sekolah dengan Laboratorium Komputer sesuai SPM	>65%		>70%	>75%						Dinas Pendidikan	APBD
	12. Pelaksanaan Kembali Bersekolah Anak Kawasan Pesisir, Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba, Anak Penghuni Lembaga Permasyarakatan, Anak Panti Asuhan Mengaji, Anak Kawasan Pesisir Mengaji (Kas Anak Kasir)	Angka Harapan Lama Sekolah			12-15	12-15	>80%					Dinas Pendidikan	APBD
		Angka Rata-rata Lama Sekolah			8-12	8-12							APBD
		Angka Melanjutkan SD dan SMP			95-100	95-100							APBD
		Anak Putus Sekolah SD dan SMP			< 1,00%	< 0,95%	< 0,85%	< 0,75%	< 0,65%	< 0,60%	< 0,55%		APBD
	13. Pelaksanaan Deli Serdang Mewujudkan Impian Sekolah Peduli Keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus (Demi Sepeda Bagus)	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan										Dinas Pendidikan	APBD, CSR
S.3. Pembangunan Deli Serdang <i>Crisis Center</i> untuk meningkatkan responsifitas didukung kemudahan dan	14. Pembangunan Deli Serdang <i>Crisis Center</i> atau pelayanan kegawatdaruratan yang terintegrasi di sektor kesehatan, perhubungan (kecelakaan),	MoU Platform Layanan Kedaruratan										Kepolisian, Satpol PP, Dishub, Damkar, Dinas Kesehatan,	APBD
		Penelahaan dan Perumusan SOP Layanan Kedaruratan											APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
kepastian pelayanan kegawatdaruratan	gangguan ketentraman umum, kepolisian, dan kebencanaan	Pengembangan Sistem Informasi <i>Crisis Center</i>										Bappeda, BPBD, Diskominfostan	APBD
		<i>Dashboard</i> Sistem Informasi <i>Crisis Center</i>											APBD
		Pelatihan Operator dan Pelaksana				25	25	25	25	25			APBD
	15. Penyediaan <i>Early Warning Sistem</i> pada titik-titik rawan bencana	Jumlah Komulatif OPD pelaksana MoU dengan Dinas Kependudukan dan Capil		4	10	16	20	25	28	31			APBD
16. Optimalisasi Penegakan Perda melalui pendekatan Marhusip (Bermartabat, Humanis dan Kreatif)	16. Optimalisasi Penegakan Perda melalui pendekatan Marhusip (Bermartabat, Humanis dan Kreatif)	Percentase Penegakan Perda		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satpol PP	APBD	
		Pengembangan Jejaring Kerja via Whatsapp									Satpol PP	APBD	
		Pengembangan SIEVAPROGIAT (Sistem Evaluasi Program Kegiatan)									Satpol PP	APBD	



Smart Environment

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target							Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
En.1. Peningkatan kepastian hukum dan keterbukaan informasi pengelolaan lingkungan hidup guna tata kelola sumber daya air, tanah, dan udara yang berkelanjutan	1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten	Dokumen RPPLH									Bappeda, Dinas LH	APBD
		Sinkronisasi Database IKPLHD		>70%	>80%	>90%	100%	100%	100%	100%	Bappeda, Dinas LH	APBD
		Pengembangan e-environment									Dinas LH	APBD
	3. Pengembangan sensor kualitas udara, air, tanah dengan hasil yang terintegrasi dalam Deli Serdang Big Data	Dashboard e-environment									Dinas LH	APBD
		Aplikasi Silintong Kuas (Sistem Online Monitoring Kualitas Air Sungai)									Dinas LH	APBD
		Jumlah Lokasi Sensor (SILONTONG KUAS)		22	44	66	88	110	132	154	Dinas LH	APBD
	4. Perumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD)	Dokumen KLHS									Bappeda, Dinas LH	APBD
	5. Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan secara berkala secara partisipatif	Peningkatan Indeks kualitas lingkungan hidup (YoY)		2-5%	2-5%	2-5%	2-5%	2-5%	2-5%	2-5%	Dinas LH	APBD

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
		Penurunan Pelanggaran pencemaran lingkungan		<10	8	<6	<4	<2	<2	<2	Dinas LH	APBD	
	a. Stop BAB (Buang Air Besar) Sembarangan	Persentase pengurangan pencemaran lingkungan									Kecamatan STM Hilir	APBD	
	B. Meningkatkan Masyarakat Sadar Lingkungan Melalui Pengelolaan Pertanian Pintar (Mas Darling Papa Pintar)	Persentase pengurangan pencemaran lingkungan						5-10%	15-30%	30-60%	Dinas LH, Masyarakat	APBD, CSR	
En.2. Pengelolaan sampah dan limbah berkelanjutan didukung perluasan jangkauan dan kapasitas pengelolahan persampahan dan limbah rumah tangga maupun industri	6. Peningkatan infrastruktur manajemen pengelolaan pelayanan persampahan	Dokumen Jakstrada Pengolahan Sampah									Dinas LH	APBD	
		persentase penanganan sampah (per tahun) (SMASH)									Dinas LH	APBD	
	a. Aplikasi Jumpa Madu (Jemput Sampah - Terima Duit)	Persentase pengurangan sampah (per tahun)			>70%	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	Dinas LH	APBD	
	b. Aplikasi SIMOGANAS (Sistem Monitoring Pengurangan dan Penanganan Sampah)	Tahun Pengembangan			5-10%	5-10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%	Dinas LH	APBD, CSR	
	7. Pengelolaan persampahan dengan pendekatan konversi energy	Kapasitas sampah terolah menjadi menjadi energi dibandingkan produksi sampah		>55	>60%	>65%	>70%	>75%	>80%	>85%	Dinas LH	APBD	
	8. Pemanfaatan sampah terpisah di unit-unit pengelolaan sampah	Jumlah Akumulatif Pembentukan TPS3R di Kecamatan		>3	>6	>10	>13	>16	>18	22	Dinas LH	APBD	

Strategi	Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Base-line (2018)	Target								Leading Sector	Sumber Dana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
En.3. Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan		Jumlah Akumulatif Pembentukan Bank Sampah Aktif		80	120	160	200	240	280	320	Dinas LH	APBD	
		Penerapan Model Pengelolaan Sampah TPS Basah Komisi (Tempat Pengumpulan Sampah 3R - Bank Sampah - Rumah Kompos, Terintegrasi)									Dinas LH	APBD, CSR	
		9. Pengembangan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT)	Percentase Rumah Tangga yang terlayani	>300	>300	>350	>400	>450	>500	>550	>600	Dinas CIKATARU	APBD
		10. Pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku	Percentase ijin pengelolaan limbah B3 dibanding jumlah perusahaan penghasil limbah B3		>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	100%	100%	Dinas LH	APBD
		11. Pelaksanaan gerakan hemat energi di lingkup perkantoran pemerintah, swasta, sekolah, dan masyarakat	Jumlah Komunitas		120	140	160	180	200	220	240	Dinas SDABMBK	APBD, APBN
		12. Pengadaan penerangan jalan umum hemat energi dan pemanfaatan energi alternatif dalam kawasan permukiman	Jumlah <i>smart building</i> hemat energi		6	8	10	12	14	16	20	Dinas SDABMBK, Swasta	APBD, APBN, CSR, Swadaya
			Percentase lampu hemat energi	(2017) 1936 (2018) 968	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	Dinas SDABMBK, Swasta	APBD, APBN, CSR, Swadaya

Chapter 6

Penutup



Perkembangan teknologi informasi di dunia sangatlah masif dengan berbagai inovasi yang mencuat dari kalangan generasi. Penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan *grand scenario* berupa tren *Internet of Things* (IoT). Implementasi Smart City di Indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.

Pada tahun 2018, Kabupaten Deli Serdang terpilih dari salah satu diantara 25 Kota kedua untuk menjadi *Pilot Project* Smart City. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan *smart nation* yang dirangkai dari *smart cities* maka Kabupaten Deli Serdang melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan **Deli Serdang Smart City**. Dimensi Deli Serdang Smart City menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Perbaikan di setiap fungsi adalah guratan tegas untuk mewujudkan Indonesia *Smart Nation*. Negara cerdas yang dibentuk dengan membangun kota-kotanya untuk menjadi cerdas melalui platform kebijakan pembangunan Smart City. **Smart City** merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Memperhatikan isu strategis baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, mempertimbangkan kebijakan perencanaan jangka panjang, menelaah visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019, serta sebagai telaah yang logis dan implementatif untuk Rancangan Teknokratis RPJMD Deli Serdang 2020-2025 dan selaras dengan semangat yuridis, filosofis, dan sosiologis pembangunan Deli Serdang maka Visi Deli Serdang Smart City 2019-2025 sebagai keselarasan **"Deli Serdang Yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan"** sebagai berikut:

Deli Serdang Smart City

2019-2025



*"Advanced and Prosperous Smart City,
Bhinneka honours Religious in Diversity"*

**Deli Serdang, Kota Cerdas yang Maju dan Sejahtera,
Kebhinnekaan menjunjung Keber'agama'an dalam Keberagaman**

Kelindan Pembangunan Deli Serdang yang dirangkai dalam “Kebhinnekaan menjunjung Keber'agama'an dalam Keberagaman” menghadirkan Deli Serdang sebagai penggerak pembangunan nasional dengan industri, konektivitas, dan berbagai inovasi lain namun tetap menjaga Deli Serdang sebagai Kota yang Religius yang mempersatukan keragamaan Budaya. Pembangunan yang bergeliat harus selaras dengan kerukunan umat beragama berlandaskan nilai-nilai keluhuran Deli Serdang. Pencapaian Deli Serdang saat ini adalah komitmen dan perjuangan bersama seluruh masyarakat Deli Serdang, dunia usaha, anggota legislatif, jajaran forkopimda, perangkat daerah, serta segenap pelaku pembangunan dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terjalin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menghadirkan pemerintahan yang kuat dan harmonis, serta pembangunan Deli Serdang yang maju dan berdaya saing.

BUPATI DELI SERDANG

H. ASHARI TAMBUNAN